

## Analisis Potensi dan Kesenjangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 2013

### *Analysis of VAT Revenue Potential and Gap in Indonesia 2013*

Rubino Sugana<sup>a,\*</sup>, Asrul Hidayat<sup>b</sup>

<sup>a</sup>*Duke Center for International Development, Duke University, USA*

<sup>b</sup>*Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI*

---

#### Abstract

*This study is conducted to develop a model that can be used to estimate the VAT revenue potential, tax gaps, and the impact of policy changes using the Input-Output Table. The amount of VAT revenue projection generated by this model is close to the VAT revenue realisation. The result of this study shows that the VAT compliance rate is only around 53%. Improving VAT compliance rate would generate a higher impact on VAT revenue as compared with raising the VAT rate. On the other hand, removing all VAT exemptions, besides increasing the administrative burden, it could also reduce VAT revenue from certain economic sectors, even though it will reduce economic distortions and avoid the need for special VAT treatment.*

**Keywords:** *VAT; Sales Tax on Luxury Goods; Tax Gap; I-O Table; Tax Potential*

#### Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk menyusun sebuah model yang dapat digunakan dalam penghitungan potensi dan kesenjangan penerimaan (*tax gap*) PPN, dan mengestimasi dampak perubahan kebijakan terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan *Tabel Input-Output* (Tabel I-O). Model ini menghasilkan estimasi penerimaan PPN untuk tahun 2013 yang mendekati nilai realisasi penerimaan aktual. Hasil studi menunjukkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN di Indonesia hanya sekitar 53%. Peningkatan kepatuhan akan memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penerimaan dibandingkan menaikkan tarif PPN. Sebaliknya, penghapusan seluruh fasilitas PPN (Dibebaskan PPN, Tidak Dipungut PPN, dan PPN Tidak Dikenakan), selain dapat meningkatkan beban administrasi, untuk sektor tertentu justru dapat menurunkan penerimaan PPN, walaupun hal ini akan mengurangi distorsi ekonomi dan menghindari kebutuhan akan perlakuan khusus.

**Kata kunci:** PPN; PPnBM; Kesenjangan Pajak; Tabel I-O; Potensi Pajak

**JEL classifications:** E17; H25

---

## Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mu-

lai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 April 1985. Dasar hukum penerapan PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1985

---

\* Alamat Korespondensi: 270 Rubenstein Hall, Duke University Box 90237, Durham, NC 27708, USA. E-mail: [rsugana@post.harvard.edu](mailto:rsugana@post.harvard.edu).

tentang Pelaksanaan UU PPN 1984. Undang-undang ini menggantikan UU Pajak Penjualan 1951 yang sudah diberlakukan sejak tahun 1953. Berdasarkan UU PPN 1984, pertimbangan dilakukannya perubahan atas aturan UU Pajak Penjualan 1951 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan rakyat, rasa keadilan, dan kebutuhan pembangunan serta untuk mendorong dan meningkatkan daya saing komoditas ekspor nonminyak di pasaran luar negeri.

Penerimaan PPN memiliki peranan penting terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2012, sekitar 40,3% penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersumber dari penerimaan PPN. Secara nominal, jumlah penerimaan PPN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak 2002 hingga 2013, penerimaan PPN mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sekitar 18% setiap tahun. Namun demikian, kinerja pemungutan PPN ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi. Pada tahun 2011, persentase konsumsi terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sekitar 56,8%. Dengan angka rasio penerimaan PPN terhadap PDB (rasio PPN) sebesar 3,75%, maka secara efektif sekitar 65,9% konsumsi merupakan basis PPN. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pemerintah, khususnya DJP, telah melakukan upaya penyempurnaan administrasi perpajakan. UU PPN telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1994 dengan diterbitkannya UU PPN Nomor 11 tahun 1994. Aturan yang diubah dalam undang-undang tersebut di antaranya pasal yang terkait jenis penyerahan yang dikenakan PPN, seperti penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antarcabang serta penyerahan secara konsinyasi. Pada perubahan

undang-undang ini juga dilakukan perubahan tarif tertinggi PPnBM dari 20% menjadi 50%. Selain itu, pengkreditan PPN masukan dan fasilitas PPN juga diatur lebih jelas dalam UU PPN Nomor 11 tahun 1994 ini.

Pada tahun 2000, UU PPN kembali mengalami perubahan dengan diterbitkannya UU Nomor 18 tahun 2000. Perubahan yang signifikan terlihat pada jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Pada perubahan tersebut jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang. Selain itu, tarif tertinggi PPnBM juga mengalami perubahan menjadi 75%. Perubahan UU PPN terakhir dilakukan pada tahun 2009. UU PPN Nomor 42 tahun 2009 menetapkan beberapa perubahan signifikan, di antaranya penentuan saat pajak terutang, penentuan saat pembuatan faktur pajak, pengenaan PPN atas ekspor jasa kena pajak, dan beberapa hal lainnya.

Pertimbangan dilakukannya perubahan peraturan perpajakan tersebut di antaranya adalah untuk mengamankan penerimaan negara. Namun, pada periode 2002–2013, rasio PPN masih berada pada kisaran 3,5–4,5%. Dengan kondisi seperti ini, perubahan kebijakan yang diberlakukan pada periode tersebut belum memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan rasio PPN. Kendala utama peningkatan rasio PPN ini diperkirakan terdapat pada efisiensi dan kapasitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntary compliance*).

Studi ini dimaksudkan untuk menyusun sebuah model yang dapat digunakan untuk menghitung potensi dan kesenjangan penerimaan (*tax gap*) PPN, serta mengestimasi dampak perubahan kebijakan terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan *Tabel Input-Output* (Tabel I-O). Studi tentang PPN dengan menggunakan Tabel I-O sebelumnya pernah dilakukan oleh Marks (2003), yang menggunakan Tabel I-O tahun 1995. Hasil studi Marks menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan PPN

saat itu 45% di bawah potensi penerimaan yang seharusnya dapat dicapai. Studi tersebut juga membahas dampak adanya jenis barang dan jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN terhadap penerimaan PPN. Marks menyimpulkan bahwa apabila seluruh pengecualian pengenaan PPN terhadap beberapa jenis barang dan jasa di sektor usaha tertentu dihapus justru dapat menyebabkan penurunan penerimaan PPN.

Studi ini mencoba memvalidasi angka kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN pada studi yang dilakukan oleh Marks (2003). Perbedaan utama dengan studi sebelumnya terdapat pada penentuan proporsi kena pajak, penghitungan tingkat kepatuhan, dan tahun pajak yang diteliti. Studi ini berupaya melakukan analisis yang lebih rinci terhadap proporsi kena pajak pada masing-masing sektor. Oleh karena itu, terdapat suatu sektor usaha memiliki proporsi kena pajak tidak hanya 0 dan 1, tetapi juga antara 0 dan 1 untuk sektor yang *outputnya* dikenakan dan tidak dikenakan PPN. Estimasi tingkat kepatuhan tidak hanya dilihat secara agregat, tetapi juga per sektor. Selain itu, tahun pajak yang akan diestimasi pada studi ini adalah tahun 2013 sehingga diharapkan dapat mencerminkan kondisi wajib pajak terkini.

Pellechio dan Hill (1996) juga melakukan studi tentang penghitungan basis PPN dengan menggunakan Tabel I-O. Dalam studi tersebut, basis PPN dihitung dengan pendekatan produksi dan konsumsi. Pada pendekatan produksi, basis PPN dihitung dari PDB, sedangkan pada pendekatan konsumsi, basis PPN dihitung dari konsumsi akhir. Model yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi penerimaan PPN di Zambia. Pada tahun yang sama, Jenkins dan Kuo (1996) juga membuat estimasi penerimaan PPN dengan menggunakan Tabel I-O dengan pendekatan yang hampir sama dengan Pellechio dan Hill. Model PPN tersebut digunakan untuk mengestimasi penerimaan PPN di Nepal tahun 1993–1994.

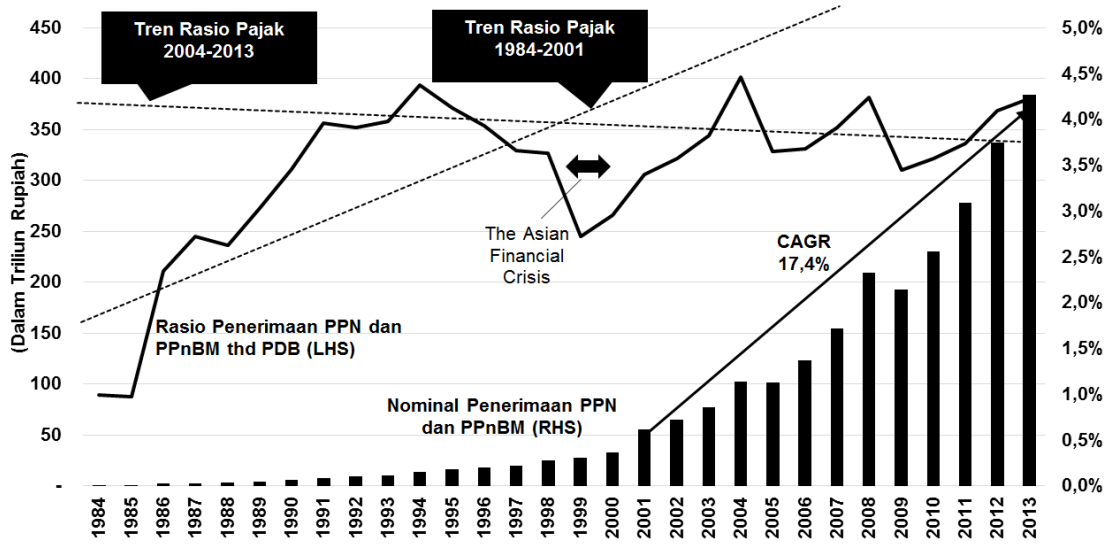
Model yang dibangun pada studi ini me-

manfaatkan Tabel I-O tahun 2008 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diproyeksikan menjadi tahun 2013. Dengan adanya studi ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengestimasi kesenjangan penerimaan PPN dan memperkirakan dampak kebijakan pemberian fasilitas PPN dan perubahan tarif terhadap penerimaan PPN. Model ini juga dapat memetakan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN berdasarkan sektor usaha sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sektor usaha yang menjadi prioritas kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi.

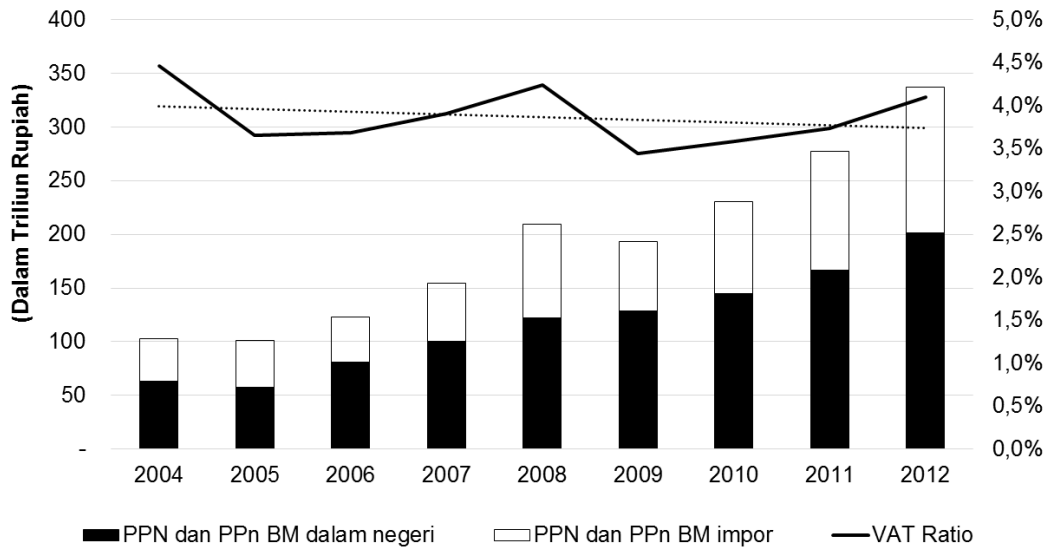
### Kinerja Pemungutan PPN dan PPn-BM

PPN memberikan kontribusi hampir mencapai 50% dari total penerimaan pajak yang dikelola oleh DJP. Sejak awal dekade diberlakukannya UU PPN, rasio penerimaan PPN dan PPnBM terhadap PDB, atau disebut juga dengan istilah rasio PPN, mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,9% pada tahun 1984 menjadi lebih dari 4,3% pada tahun 1994. Namun, perkembangan rasio PPN ini mengalami penurunan hingga menjadi sekitar 2,7% di tahun 1999. Setelah tahun 1999 hingga tahun 2004, rasio PPN cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai 4,5%. Sejak tahun 2004, rasio PPN mengalami fluktuasi dengan kecenderungan sedikit menurun, walaupun secara nominal penerimaan PPN sejak tahun 2002 hingga tahun 2012 tumbuh sebesar lebih dari 500% (Gambar 1).

Gambar 2 menampilkan statistik penerimaan PPN dan PPnBM berdasarkan sumber penerimaan dalam negeri dan impor. Sejak tahun 2004 sampai 2013, proporsi penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri dan impor relatif stabil, yaitu rata-rata sebesar 60% dari penerimaan dalam negeri dan 40% dari impor. PPN impor dipungut di pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.



**Gambar 1:** Kinerja Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 1984–2013  
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Nota Keuangan 1984–2013, diolah



**Gambar 2:** Perbandingan Penerimaan PPN Dalam Negeri dan Impor  
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, diolah

**Tabel 1:** Perbandingan Kinerja Penerimaan PPN di Beberapa Negara ASEAN

| Indikator   | Negara-Negara ASEAN |        |          |           |          |         |
|---|---------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|
|   | Indonesia           | Laos   | Filipina | Singapura | Thailand | Vietnam |
| Tarif Standar PPN   | 10,00%              | 10,00% | 12,00%   | 7,00%     | 7,00%    | 10,00%  |
| Rasio PPN/PDB ( <i>VAT Ratio</i> ) <sup>a</sup>                       | 3,75%               | 3,50%  | 1,88%    | 2,60%     | 4,20%    | 6,10%   |
| Produktivitas PPN ( <i>VAT Productivity</i> ) <sup>b</sup>            | 37,00%              | 35,00% | 16,00%   | 37,00%    | 60,00%   | 61,00%  |
| Rasio Konsumsi terhadap PDB ( <i>Consumption Ratio</i> ) <sup>c</sup> | 56,80%              | 69,00% | 73,70%   | 40,60%    | 55,60%   | 62,70%  |
| Kinerja PPN ( <i>VAT Performance</i> ) <sup>d</sup>                   | 65,90%              | 50,70% | 21,20%   | 91,60%    | 108,00%  | 97,20%  |

Sumber: USAID (2013), diolah

Keterangan: <sup>a</sup> *VAT Ratio* merupakan perbandingan penerimaan PPN dengan PDB;

<sup>b</sup> *VAT Productivity* merupakan perbandingan antara *VAT ratio* dengan tarif PPN. Indikator ini digunakan untuk menghitung persentase PDB yang dikenakan PPN. Semakin besar angka *VAT Productivity* berarti semakin banyak bagian PDB yang dikenakan PPN atau dapat dikatakan bahwa basis PPN semakin besar;

<sup>c</sup> *Consumptions Ratio* merupakan perbandingan jumlah konsumsi terhadap total PDB. Indikator ini digunakan dengan asumsi bahwa basis PPN adalah konsumsi;

<sup>d</sup> *VAT Performance* merupakan perbandingan antara *VAT Productivity* dengan *Consumption Ratio*. Indikator ini digunakan untuk menghitung seberapa besar dari jumlah konsumsi yang dikenakan PPN.

Tabel 1 menampilkan beberapa indikator yang umum digunakan untuk membandingkan dan mengukur kinerja dan efektivitas pemungutan PPN antarnegara.

Tabel 1 ini memperlihatkan bahwa tarif PPN di Indonesia relatif sebanding dengan tarif PPN di negara-negara lain di kawasan ASEAN. Dari sisi kinerja penerimaan PPN dan produktivitas PPN, Indonesia lebih rendah daripada Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kemudian, dari sisi rasio PPN, Indonesia juga lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Begitu juga dari produktivitas PPN.

Tingkat konsumsi di Indonesia hampir sama dengan rata-rata di negara-negara ASEAN lainnya, yaitu berada di kisaran 55–70% dari PDB. Namun, rasio penerimaan PPN terhadap konsumsi dibagi dengan tarif PPN standar (*VAT Performance*) menunjukkan bahwa basis PPN di Indonesia mencakup sekitar 66% konsumsi. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Vietnam yang semuanya berada di atas 90%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *VAT Performance* bisa mencapai di atas 100% dikarenakan efek *cascading* akibat pengecualian pengenaan PPN.

Rendahnya kinerja penerimaan PPN di Indonesia terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan pembayaran PPN dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia yang masih rendah. Hasil estimasi menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran PPN di Indonesia hanya sekitar 50% (lihat Subbagian Tingkat Kepatuhan). Hasil ini hampir sama dengan temuan pada studi sebelumnya (Marks, 2003).

Tabel 2 menampilkan proporsi penerimaan PPN per sektor usaha dari tahun 2004 sampai 2010. Tabel 2 ini memperlihatkan bahwa sektor manufaktur memiliki proporsi yang paling besar terhadap penerimaan PPN, sedangkan sektor pertanian termasuk yang paling kecil. Dari sisi PDB, proporsi sektor pertanian cukup signifikan, yaitu sekitar 15%. Namun, seluruh *output* sektor ini merupakan barang yang tidak dikenakan PPN atau mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Oleh karena itu, jumlah penerimaan PPN pada sektor ini seharusnya nihil. Namun, angka statistik penerimaan yang dipublikasikan oleh DJP membukukan nilai penerimaan PPN pada sektor pertanian ini. Hal ini dapat bersumber dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di sektor pertanian tetapi juga melakukan penyerahan BKP. Con-

**Tabel 2:** Proporsi Penerimaan PPN dan PPnBM per Sektor Tahun 2004–2010

| Sektor Usaha                                    | Tahun  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 2004   | 2005   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | Rata2  |
| Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan | 1,67%  | 1,49%  | 1,46%  | 1,32%  | 1,58%  | 1,81%  | 1,82%  | 1,60%  | 1,67%  | 1,49%  |
| Pertambangan Migas                              | 11,54% | 13,16% | 20,81% | 16,23% | 18,39% | 6,99%  | 1,74%  | 12,69% | 11,54% | 13,16% |
| Pertambangan Non-Migas                          | 0,84%  | 0,94%  | 1,09%  | 1,20%  | 0,94%  | 1,20%  | 1,26%  | 1,07%  | 0,84%  | 0,94%  |
| Penggalian                                      | 0,03%  | 0,16%  | 0,09%  | 0,08%  | 0,11%  | 0,08%  | 0,07%  | 0,09%  | 0,03%  | 0,16%  |
| Manufaktur                                      | 44,62% | 43,11% | 36,26% | 37,38% | 37,36% | 44,32% | 49,98% | 41,86% | 44,62% | 43,11% |
| Listrik, Gas, dan Air Bersih                    | 0,93%  | 0,55%  | 0,63%  | 0,39%  | 0,41%  | 0,49%  | 0,56%  | 0,57%  | 0,93%  | 0,55%  |
| Konstruksi                                      | 4,41%  | 4,42%  | 5,20%  | 7,75%  | 5,94%  | 6,22%  | 5,77%  | 5,67%  | 4,41%  | 4,42%  |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran                 | 18,28% | 18,55% | 18,09% | 19,75% | 20,47% | 22,57% | 22,60% | 20,04% | 18,28% | 18,55% |
| Transportasi dan Komunikasi                     | 6,91%  | 7,38%  | 6,82%  | 6,13%  | 5,57%  | 5,39%  | 5,65%  | 6,26%  | 6,91%  | 7,38%  |
| Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan      | 7,69%  | 7,53%  | 7,02%  | 7,07%  | 4,97%  | 5,84%  | 5,99%  | 6,59%  | 7,69%  | 7,53%  |
| Jasa-jasa                                       | 1,67%  | 1,32%  | 1,31%  | 1,51%  | 1,29%  | 1,74%  | 1,57%  | 1,49%  | 1,67%  | 1,32%  |
| Lainnya   | 1,40%  | 1,39%  | 1,21%  | 1,19%  | 2,98%  | 3,34%  | 2,99%  | 2,07%  | 1,40%  | 1,39%  |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, diolah

tohnya adalah perusahaan perkebunan jagung, yang tidak hanya memiliki usaha perkebunan jagung, tetapi juga mengolah jagung menjadi minyak jagung yang merupakan objek PPN.

Sektor konstruksi juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB, yaitu sekitar 10%. Namun, seperti yang terdapat pada Tabel 2, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan baru sekitar rata-rata 4,4%. Begitu juga dengan sektor jasa yang memiliki peran sekitar 10% terhadap PDB, tetapi hanya menyumbangkan 2% dari penerimaan PPN.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sejak 1 Januari 2014 pemerintah menaikkan batasan jumlah peredaran usaha pengusaha yang wajib mendaftarkan diri sebagai PKP, yaitu dari Rp600 juta menjadi Rp4,8 miliar setahun. Kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan jumlah PKP. Oleh karena keterbatasan data, dampak kebijakan ini terhadap penerimaan PPN hanya dilihat dari perbandingan angka penerimaan PPN dalam harga konstan untuk periode yang sama pada tahun sebelum dan sesudah diberlakukan perubahan batasan PKP. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan PPN pada periode setelah diberlakukan perubahan batasan PKP tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Namun, untuk memahami dampak dari perubahan kebijakan ini perlu studi lebih lanjut menggunakan data yang lebih rinci.

## Tinjauan Referensi

### Struktur PPN dan PPnBM di Indonesia

PPN di Indonesia secara efektif dikenakan atas konsumsi akhir BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP), atau biasa disebut *consumption-type*. PPN ini dikenakan di sepanjang jalur produksi dan distribusi suatu barang/jasa hingga barang/jasa tersebut diperoleh oleh konsumen yang merupakan pemikul beban pajak yang sebenarnya. Barang modal secara efektif tidak di-

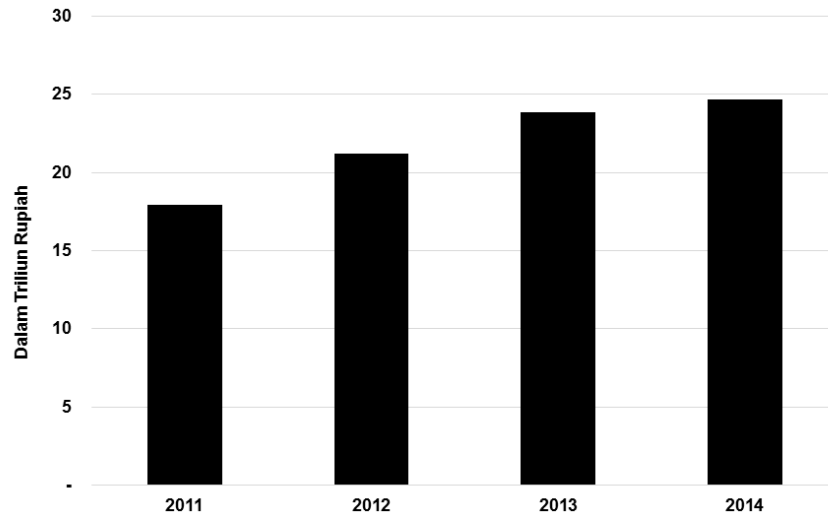
kenakan PPN.

Tarif standar PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10% dan sistem PPN di Indonesia menganut *destination principle*. Artinya, PPN dikenakan berdasarkan tempat di mana BKP atau JKP dikonsumsi; bukan berdasarkan tempat di mana BKP dan JKP diproduksi. Dengan prinsip ini, PPN hanya dikenakan apabila BKP atau JKP tersebut dikonsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor BKP dan JKP dikenakan PPN dengan tarif 0%, sedangkan BKP dan JKP impor dikenakan tarif standar yang saat ini berlaku sebesar 10%<sup>2</sup>.

Metode pemungutan PPN di Indonesia menggunakan mekanisme *credit-invoice* di setiap tahapan produksi dan distribusi (*multi-stage*). Dengan mekanisme ini, jumlah PPN yang harus disetorkan oleh PKP kepada pemerintah merupakan selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP atau JKP yang dihasilkan oleh PKP tersebut ("sebut PKP A") dan PPN yang sudah dibayarkan kepada *supplier* (yang juga merupakan PKP—"sebut PKP B") atas BKP atau JKP yang digunakan untuk memproduksi keluaran oleh PKP A. PKP A, sebagai penjual, memungut PPN Keluaran dari pembeli. Namun PKP A, sebagai pembeli, juga membayar PPN Masukan kepada PKP B (*supplier*).

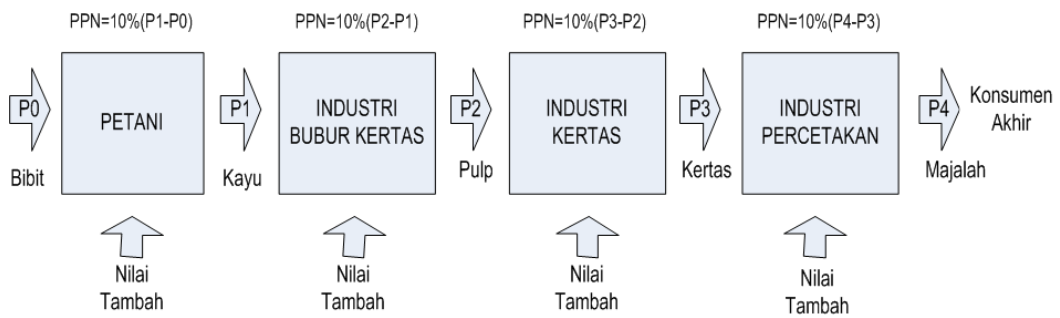
Dengan mekanisme tersebut, pengenaan PPN tidak menimbulkan efek pajak berganda (*cascading*). Apabila dalam satu masa pajak, PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran, maka PKP dapat meminta restitusi kelebihan pembayaran PPN kepada pemerintah,

<sup>2</sup>Sebagai perwujudan *destination principle*, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 100/PMK.03/2013. Dengan diberlakukannya aturan ini, PPN yang dibayarkan oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri atas pembelian barang di toko ritel yang telah ditetapkan dapat dimintakan kembali saat meninggalkan Indonesia.



**Gambar 3:** Penerimaan dan Pertumbuhan PPN dan PPnBM Periode Januari–Maret, 2011–2014 (Harga Konstan)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal



**Gambar 4:** Mekanisme Pemungutan PPN



atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Mekanisme ini terus berulang sampai BKP atau JKP diserahkan kepada konsumen akhir. Dengan mekanisme ini, pemikul beban PPN secara efektif adalah konsumen akhir (Gambar 4).

Mekanisme pemungutan PPN di Indonesia juga mengenal adanya pembeli yang terdaftar sebagai Pemungut PPN (*reverse charge*). Contoh pemungut PPN dengan mekanisme ini adalah Bendahara Pemerintah<sup>3</sup>. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP melakukan transaksi dengan Bendahara Pemerintah, maka PPN Keluaran akan langsung dipungut oleh Bendahara Pemerintah. Oleh karena itu, jumlah PPN yang harus disetorkan oleh PKP pada suatu masa pajak menjadi berkurang sebesar PPN yang sudah dipungut oleh Bendahara Pemerintah.

### Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang wajib mendaftar sebagai PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang memiliki peredaran usaha lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Pengusaha yang memiliki peredaran usaha di bawah kriteria tersebut dapat memilih menjadi PKP. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN, batasan wajib daftar PKP di Indonesia termasuk paling tinggi, sekitar 140 kali Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Di negara ASEAN lainnya angka ini berkisar antara 11–80 (Tabel 3).

<sup>3</sup>Kewajiban pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporannya. Berdasarkan peraturan tersebut, Bendaharawan Pemerintah adalah pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Objek PPN

Pada prinsipnya, objek PPN adalah penyerahan BKP dan/atau pemanfaatan JKP. Di Indonesia, barang yang dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran termasuk ke dalam jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Sebelum tahun 2009, sebagian barang tersebut termasuk ke dalam kategori barang yang bersifat strategis dan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan<sup>4</sup>.

Selain itu, barang dan jasa yang menjadi objek Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan dikecualikan dari pengenaan PPN. Besaran tarif Pajak Daerah tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Karena sifat Pajak Daerah ini sebagai pajak penjualan, maka PPN Masukan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut tidak dapat dikreditkan.

Barang hasil pertambangan, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, batu bara, asbes, dan bijih besi, termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Barang-barang ini dianggap sebagai *primary sector* yang belum memiliki nilai tambah.

UU PPN mengatur tentang daftar negatif barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (PPN Masukan tidak dapat dikreditkan). Adapun jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN<sup>5</sup>, yaitu (1) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (2) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (3) makanan dan minuman yang disajikan di

<sup>4</sup>PP Nomor 31 tahun 2007 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

<sup>5</sup>Jenis barang yang tidak dikenakan PPN diatur dalam Pasal 4A Ayat (2) UU PPN.

**Tabel 3:** Perbandingan Batasan Wajib Pengusaha Kena Pajak di Negara-Negara ASEAN

| Negara    | Batas Peredaran Usaha Tahunan <sup>a</sup> | Nilai Tukar Resmi 2012 | Faktor Konversi PPP 2012 | Batas Peredaran Usaha, PPP <sup>b</sup> (\$ Int. Nom.) | Per Kapita PDB, 2012, PPP (Cur. Int. \$) | Rasio Batas Peredaran Usaha terhadap PDB per Kapita |
|-----------|--|------------------------|--------------------------|--|--|---|
| (1)       | (2)  | (3)                    | (4)                      | (5)=[(2)/(3)]/(4)                                      | (6)                                      | (7)=(5)/(6)   |
| Indonesia | 4.800.000.000                              | 9.386,63               | 0,7177                   | 712.550  | 4.956                                    | 144   |
| Laos      | 400.000.000                                | 8.007,76               | 0,3163                   | 157.925  | 4.464                                    | 35  |
| Filipina  | 1.919.500                                  | 42,23                  | 0,5865                   | 77.501   | 4.412                                    | 18  |
| Singapura | 1.000.000                                  | 1,25                   | 0,8367                   | 956.161  | 61.803                                   | 15  |
| Thailand  | 1.800.000                                  | 31,08                  | 0,5577                   | 103.844  | 9.815                                    | 11  |
| Vietnam   | 2.500.000.000                              | 20.828,00              | 0,4000                   | 300.077  | 3.635                                    | 83  |

Sumber: USAID (2013) dan World Bank (2013), diolah

Keterangan: <sup>a</sup>Dalam mata uang lokal

<sup>b</sup>Purchasing Power Parity

hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; serta (4) uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan, jenis jasa tidak dikenakan PPN<sup>6</sup>, yaitu (1) jasa keagamaan; (2) jasa pelayanan kesehatan medik; (3) jasa pelayanan sosial; (4) jasa pendidikan; (5) jasa keuangan dan asuransi; (6) jasa pengiriman uang dengan wesel pos; (7) jasa pengiriman surat dengan prangko; (8) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; (9) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; (10) jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; (11) jasa tenaga kerja; (12) jasa perhotelan; (13) jasa boga atau catering; (14) jasa kesenian dan hiburan; (15) jasa penyediaan tempat parkir; dan (16) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

### PPN Masukan yang Dapat dan Tidak Dapat Dikreditkan

Perlakuan PPN atas suatu jenis barang dan jasa mempengaruhi dapat tidaknya pengkre-

<sup>6</sup>Jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN diatur dalam Pasal 4A Ayat (3) UU PPN.

ditan atas PPN Masukan. Perlakuan PPN atas penyerahan barang dan jasa di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu "Dikenakan PPN dengan Tarif Standar", "Tidak Dikenakan PPN", "Dibebaskan PPN", "Tidak Dipungut PPN", dan "Dikenakan PPN dengan tarif 0%". Perlakuan PPN tersebut berpengaruh terhadap mekanisme pengkreditan PPN Masukan seperti penjelasan berikut ini:

#### a. PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

PPN Masukan atas perolehan barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan perlakuan "Tidak Dikenakan PPN" atau "Dibebaskan PPN", atau umumnya dikenal sebagai *VAT exempt*, tidak dapat dikreditkan oleh PKP. Apabila PKP melakukan kegiatan penyerahan barang dan jasa yang dikenakan PPN dan juga dikecualikan (tidak dikenakan PPN dan/atau dibebaskan PPN), maka PPN Masukan yang dapat dikreditkan hanyalah sejumlah yang terkait dengan penyerahan barang dan jasa yang dikenakan PPN.

- **Tidak Dikenakan PPN:** jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini adalah jenis barang dan jasa yang diatur pada Pasal 4A UU PPN. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok dengan pertimbangan untuk mengurangi regresivitas PPN. Selain itu, terdapat jenis barang dan

jasa tidak dikenakan PPN karena pengenaan pajak atas barang atau jasa tersebut menjadi wewenang pemerintah daerah, seperti jasa perhotelan.

- **Dibebaskan PPN:** pada prinsipnya, barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini merupakan BKP dan JKP. Namun, dengan pertimbangan untuk memberikan insentif usaha dan juga isu regresivitas, maka penyerahan BKP dan JKP tersebut dibebaskan PPN. Contoh: barang yang dianggap bersifat strategis seperti makanan ternak, air bersih, dan listrik dengan daya maksimum tertentu.

#### b. PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan

PPN Masukan yang dibayar pada saat perolehan barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan BKP dan JKP yang "Dikenakan PPN dengan tarif standar", "Dikenakan PPN dengan tarif 0%" atau mendapatkan fasilitas "Tidak Dipungut PPN" merupakan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Jenis perlakuan PPN yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- **Dikenakan PPN dengan Tarif Standar:** diterapkan terhadap jenis barang dan jasa yang tidak termasuk ke dalam jenis barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN dan/atau dibebaskan PPN dan/atau tidak dipungut PPN.
- **Dikenakan PPN dengan Tarif 0% (*zero-rated*):** diterapkan terhadap ekspor BKP atau JKP. Hal ini konsisten dengan penerapan *destination principle*.
- **Tidak Dipungut PPN:** penerapannya hampir sama dengan PPN dibebaskan di mana pembeli BKP atau JKP tidak perlu membayar PPN, namun PPN Masukan untuk menghasilkan BKP atau JKP tersebut tetap dapat dikreditkan. Contoh: pemasukan barang dari daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut. Selain itu, PPN tidak dipungut juga diberlakukan atas impor dan penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan

proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut merupakan fasilitas PPN dirancang untuk mendorong kegiatan tertentu. Namun, fasilitas ini dapat menimbulkan distorsi ekonomi. Selain fasilitas PPN tersebut, pemerintah juga pernah menerapkan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah, seperti perlakuan PPN atas penjualan minyak goreng curah. Bagi wajib pajak, fasilitas ini secara efektif sama dengan pengenaan PPN dengan tarif 0%. Daftar peraturan pemberian fasilitas PPN dapat dilihat di Tabel 13.

#### Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PPnBM adalah pajak yang dikenakan satu kali atas penyerahan barang tertentu yaitu pada saat impor barang mewah atau saat penyerahan pertama kali oleh produsen yang menghasilkan barang yang dikategorikan mewah. Basis pajak PPnBM adalah harga BKP/JKP tidak termasuk PPN. PPnBM tidak dapat dikreditkan, tetapi dapat direstitusi dalam hal barang yang tergolong mewah yang PPnBM-nya telah dibayar tersebut diekspor kembali.

Batasan barang yang tergolong mewah diatur dalam PP Nomor 41/2013 Tentang Barang Kena Pajak yang Ter tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2013, PPnBM juga dikenakan atas barang selain kendaraan bermotor seperti rumah mewah, arloji mewah, dan lain-lain (lihat Tabel 14).

#### Restitusi PPN

Restitusi terjadi apabila PKP memiliki jumlah PPN Masukan yang lebih besar daripada PPN Keluaran. Ketentuan PPN di Indonesia mengatur bahwa apabila dalam suatu masa pajak, PPN Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PPN Keluaran, maka selisihnya

merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan direstitusi di akhir tahun pajak. Namun, PKP tertentu mendapat pengecualian sehingga dapat mengajukan permohonan restitusi pada setiap masa pajak, seperti<sup>7</sup>:

- PKP yang melakukan ekspor BKP (berwujud maupun tidak berwujud), atau JKP;
- PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN;
- PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut; dan
- PKP dalam tahap belum berproduksi.

Jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi diatur sebagai berikut:

#### a. Satu Bulan

seperti diatur dalam Pasal 17C dan 17D UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)<sup>8</sup>. Dengan mekanisme yang diatur dalam UU KUP, DJP melakukan studi atas permohonan restitusi PKP. Berdasarkan hasil studi tersebut, DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sebagai dasar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada PKP. PKP yang penyelesaian restitusinya termasuk dalam kategori ini adalah:

- **PKP dengan Kriteria Tertentu:** yaitu PKP yang tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai tunggakan atas semua jenis pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik selama 3 tahun berturut-turut dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

<sup>7</sup>Pasal 9 ayat (4b) UU PPN mengatur tentang restitusi yang dapat diajukan setiap masa pajak.

<sup>8</sup>Pasal 17C UU KUP mengatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, sedangkan Pasal 17D UU KUP mengatur tentang kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

- **PKP dengan Persyaratan Tertentu:** yaitu PKP yang menyampaikan SPT masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Batasan jumlah lebih bayar tersebut adalah tidak lebih dari Rp100 juta<sup>9</sup>.
- **PKP Berisiko Rendah:** berdasarkan Pasal 9 Ayat (4c) UU PPN, untuk PKP yang melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 ayat (4b) UU PPN seperti yang dijelaskan sebelumnya yang memenuhi kriteria sebagai PKP berisiko rendah, proses restitusinya disamakan dengan PKP kriteria tertentu. Kriteria PKP yang berisiko rendah yaitu PKP yang merupakan perseroan terbatas yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, atau memenuhi persyaratan tertentu<sup>10</sup>. Persyaratan tertentu yang dimaksud di sini adalah tepat waktu dalam penyampaian SPT masa PPN selama 12 bulan terakhir, 75% dari jumlah BKP yang dijual merupakan produksi sendiri, dan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian.

#### b. Dua Belas Bulan

apabila PKP tidak memenuhi kriteria sebagai PKP kriteria tertentu, berisiko rendah, atau memenuhi persyaratan tertentu. Contohnya, PKP melaporkan SPT masa PPN tidak tepat waktu selama tiga masa terakhir. Permohonan kelebihan pembayaran PPN pada kategori ini diatur dalam Pasal 17B UU KUP. Dengan

<sup>9</sup>Diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

<sup>10</sup>Diatur dalam PMK Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

mekanisme ini, DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan restitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, apabila SPT yang disampaikan sudah benar, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagai dasar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada PKP.

Dalam melakukan studi ini, penulis tidak berhasil memperoleh data statistik untuk mengukur kinerja pembayaran restitusi. Oleh karena itu, tingkat penyelesaian restitusi tidak dibahas pada studi ini.

### **Pengenaan PPN dalam Proses Produksi dan Distribusi**

Mekanisme pemungutan PPN dengan mekanisme *credit-invoice* dapat dilihat pada Tabel 4. Contohnya, pada rantai distribusi yang terakhir, jumlah yang harus dibayar oleh konsumen akhir adalah Rp1.000 ditambah dengan PPN 10% atau Rp100. Jumlah PPN yang dipungut oleh penjual dari konsumen akhir ini sama dengan total jumlah PPN yang disetorkan ke kas negara pada setiap rantai produksi dan distribusi. Begitu juga dengan harga yang dibayar oleh konsumen akhir sama dengan total nilai tambah pada setiap rantai produksi dan distribusi. Konsep ini menunjukkan bahwa penanggung utama PPN adalah konsumen akhir.

Seperti halnya penerapan PPN pada umumnya di berbagai negara, Indonesia juga memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis barang atau jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN. Ada beberapa pertimbangan untuk tidak mengenakan PPN atas barang atau jasa tertentu, seperti pertimbangan sosial politis, pertimbangan teknis, serta administratif.

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayar pada saat memperoleh *input*. Apabila barang dan jasa tidak dikenakan PPN digunakan sebagai *input* antara, maka basis PPN dan penerimaan PPN pada rantai produksi beri-

kutnya akan menjadi lebih besar karena PPN masukan atas *input* antara akan diperhitungkan sebagai biaya dalam menentukan harga jual barang dan jasa yang dihasilkan.

Apabila barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN merupakan penjualan akhir ke konsumen, maka nilai tambah untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut bukan merupakan basis PPN. Berdasarkan uraian ini, terdapat dua basis PPN yaitu konsumsi akhir dan PPN masukan atas barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN seperti yang ditampilkan pada Tabel 5. Kedua hal inilah yang menjadi dasar untuk membangun model analisis dan estimasi penerimaan PPN dengan pendekatan konsumsi. Dengan pendekatan konsumsi ini, pengusaha yang melakukan penjualan barang yang tidak dikenakan PPN dianggap sama dengan konsumen akhir.

Pada Tabel 5, sektor manufaktur diasumsikan tidak dikenakan PPN (manufaktur diasumsikan bukan PKP). PPN Masukan yang dibayarkan oleh manufaktur kepada penggajian tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, manufaktur akan memperhitungkan PPN Masukan tersebut sebagai biaya dalam menentukan harga pokok penjualan. Dalam contoh di Tabel 5, diasumsikan semua biaya PPN Masukan dapat diteruskan ke pembeli berikutnya (pedagang besar). Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan untuk tidak mengenakan PPN pada pengusaha yang menghasilkan *input* antara berpotensi meningkatkan penerimaan PPN.

Untuk menghitung potensi penerimaan PPN dengan pendekatan konsumsi, perlu diketahui jumlah dan komposisi konsumsi akhir dan jumlah dan komposisi *input* antara pengusaha bukan PKP. Selanjutnya, diperlukan estimasi tentang komposisi BKP dan JKP di antara total konsumsi akhir dan *input* antara.

### **Kerangka Model Estimasi Potensi Penerimaan PPN**

Tabel 6 mengilustrasikan kerangka model yang digunakan dalam studi ini untuk mengestima-

**Tabel 4:** PPN atas Produksi dan Distribusi Pedagangan Furnitur

| Sektor          | Produk       | Pembelian     | Penjualan    | Nilai<br>Tambah | PPN 10%<br>atas Penjualan | PPN        |                        |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------------|
|                 |              | di Luar Pajak |              |                 |                           | Masukan    | Disetor                |
| Penebang Kayu   | Batang Pohon | 0             | 200          | 200             | 20                        | 0          | 20                     |
| Penggergajian   | Kayu         | 200           | 300          | 100             | 30                        | 20         | 10                     |
| Manufaktur      | Furnitur     | 300           | 700          | 400             | 70                        | 30         | 40                     |
| Pedagang Besar  | Furnitur     | 700           | 800          | 100             | 80                        | 70         | 10                     |
| Pedagang Eceran | Furnitur     | 800           | 1.000        | 200             | <b>100<sup>a</sup></b>    | 80         | 20                     |
| <b>Total</b>    |              | <b>2.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>1.000</b>    | <b>300</b>                | <b>200</b> | <b>100<sup>b</sup></b> |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: <sup>a</sup>PPN Akhir

<sup>b</sup>Total PPN

**Tabel 5:** Implikasi Pengecualian Pengenaan PPN di Tahap Antara

| Sektor                  | Produk       | Pembelian     | Penjualan    | Nilai<br>Tambah | PPN 10%<br>atas Penjualan | PPN     |            |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|
|                         |              | di Luar Pajak |              |                 |                           | Masukan | Disetor    |
| Penebang Kayu           | Batang Pohon | 0             | 200          | 200             | 20                        | 0       | 20         |
| Penggergajian           | Kayu         | 200           | 300          | 100             | <b>30<sup>b</sup></b>     | 20      | 10         |
| Manufaktur <sup>a</sup> | Furnitur     | 330           | 730          | 400             | 0                         | 0       | 0          |
| Pedagang Besar          | Furnitur     | 730           | 830          | 100             | 83                        | 0       | 83         |
| Pedagang Eceran         | Furnitur     | 830           | 1.030        | 200             | <b>103<sup>c</sup></b>    | 83      | 20         |
| <b>Total</b>            |              | <b>2.090</b>  | <b>3.090</b> | <b>1.000</b>    | <b>233</b>                | 103     | <b>133</b> |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: <sup>a</sup>Manufaktur furnitur tidak dikenakan PPN

<sup>b</sup>Masukan usaha tidak kena PPN

<sup>c</sup>PPN konsumen akhir

si penerimaan PPN dengan pendekatan konsumsi. Penjelasan lebih rinci mengenai metodologi analisis PPN dapat dilihat di Glenday *et al.* (2010). Kolom 3 berisi nilai konsumsi akhir atau nilai *input* antara yang merupakan hasil proyeksi ke tahun 2013 dari Tabel I-O 2008. Nilai konsumsi akhir pada kolom 3 adalah sama dengan nilai konsumsi akhir pada Tabel I-O kolom 301. Untuk nilai *input* antara, angka-angka pada kolom 3 merupakan hasil proyeksi ke tahun 2013 dari Tabel I-O 2008 baris 190.

Dengan adanya berbagai pengecualian dan pemberian PPN 0% untuk penyerahan barang dan jasa tertentu, maka tidak semua angka-angka konsumsi dan *input* antara merupakan basis PPN. Oleh karena itu, perlu diestimasi berapa besar dari angka-angka tersebut yang menjadi basis PPN dan PPnBM. Kolom 4 berisi perkiraan proporsi dalam persentase dari konsumsi akhir atau *input* antara yang merupakan objek PPN atau PPnBM. Metode pe-

*JEPI Vol. 15 No. 1 Juli 2014*

ntuan proporsi angka konsumsi dan *input* antara yang merupakan objek PPN dan PPnBM (*taxable proportion*) dijelaskan pada bagian berikutnya.

Estimasi proporsi konsumsi atau *input* antara kena pajak didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Namun demikian, tidak semua wajib pajak patuh melaporkan seluruh transaksi yang kena PPN dan PPnBM. Untuk itu, perlu diperkirakan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk masing-masing sektor ekonomi. Basis pajak efektif merupakan perkalian antara nilai konsumsi atau *input* antara untuk masing masing sektor ekonomi dikalikan dengan proporsi kena pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perkiraan penerimaan PPN dan PPnBM dari masing-masing sektor ekonomi merupakan perkalian tarif pajak rata-rata dengan basis efektif PPN dan PPnBM. Dengan model ini diharapkan dapat diestimasi dampak dari per-

**Tabel 6:** Kerangka Model Estimasi Potensi Penerimaan PPN

| No                       | Sektor         | Nilai | Proporsi Kena PPN | Tingkat Kepatuhan | Basis PPN/PPnBM Efektif | Tarif PPN | Proyeksi Penerimaan |
|--------------------------|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| (1)                      | (2)            | (3)   | (4)               | (5)               | (6)                     | (7)       | (8)                 |
| PENGELUARAN RUMAH TANGGA |                |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 1                        | Sektor 1       |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 2                        | Sektor 2       |       |                   |                   |                         |           |                     |
| ...                      | ...            |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 66                       | Sektor 66      |       |                   |                   |                         |           |                     |
| PENGELUARAN USAHA        |                |       |                   |                   |                         |           |                     |
| A. Investasi             |                |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 1                        | Sektor 1       |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 2                        | Sektor 2       |       |                   |                   |                         |           |                     |
| ...                      | ...            |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 66                       | Sektor 66      |       |                   |                   |                         |           |                     |
| B. <i>Input</i> Antara   |                |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 1                        | Sektor 1       |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 2                        | Sektor 2       |       |                   |                   |                         |           |                     |
| ...                      | ...            |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 66                       | Sektor 66      |       |                   |                   |                         |           |                     |
| PENGELUARAN PEMERINTAH   |                |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 1                        | Pusat          |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 2                        | Provinsi       |       |                   |                   |                         |           |                     |
| 3                        | Kabupaten/Kota |       |                   |                   |                         |           |                     |
| TOTAL                    |                |       |                   |                   |                         |           |                     |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

ubahan kebijakan sektoral terhadap total penerimaan PPN dan PPnBM. Namun demikian, model yang digunakan bersifat statis dan tidak secara eksplisit memperhitungkan respons dari perilaku PKP.

$$PPN_i = B_i \times P_i \times K_i \times t \quad (1)$$

dengan:

$PPN_i$  : Penerimaan PPN dan PPnBM dari komoditas atau sektor usaha  $i$ ;

$B_i$  : Konsumsi akhir rumah tangga atau *input* antara usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa tidak dikenakan PPN;

$P_i$  : Proporsi konsumsi akhir rumah tangga atau *input* antara usaha yang dikenakan PPN dan PPnBM;

$K_i$  : Tingkat kepatuhan untuk komoditas atau sektor usaha  $i$ ;

$t$  : Tarif rata-rata PPN atau PPnBM.

## Metode

### Sumber Data

Sumber data utama untuk studi ini adalah Tabel I-O yang dipublikasikan oleh BPS. Tabel I-O disajikan dalam bentuk matriks, di mana masing-masing barisnya menunjukkan *output* suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian *input* antara dan *input* primer oleh suatu sektor dalam proses produksi. Tabel I-O terakhir yang dikeluarkan BPS adalah hasil pemutakhiran tahun 2008. BPS membagi Tabel I-O Tahun 2008 menjadi 66 sektor perekonomian<sup>11</sup>.

### Faktor Pengali untuk Memproyeksikan Tabel I-O ke Tahun 2013

Untuk keperluan analisis penerimaan PPN tahun 2013, maka Tabel I-O tahun 2008 dipro-

yeksikan ke tahun 2013. Proyeksi ini dilakukan dengan menentukan Faktor Pengali (*gross up factor*) untuk memproyeksikan nilai konsumsi akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan *input* antara.

Karena data yang dibutuhkan untuk menghitung Faktor Pengali tidak tersedia untuk setiap sektor ekonomi, maka Faktor Pengali untuk suatu sektor utama diasumsikan sama dengan untuk masing-masing subsektor penyusunnya. Misalnya, Faktor Pengali untuk sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan sama dengan Faktor Pengali bagi masing-masing subsektor penyusunnya yaitu subsektor jagung, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan tanaman bahan makanan lainnya.

Faktor Pengali diperoleh dengan menggunakan formula di bawah ini:

$$G_i = \frac{PDB_{i,t}}{PDB_{i,0}} \quad (2)$$

dengan:

$G_i$  : Faktor Pengali;

$PDB_{i,t}$  : PDB tahun proyeksi;

$PDB_{i,0}$  : PDB tahun dasar.

Terdapat dua pendekatan dalam menentukan PDB tahun proyeksi ( $PDB_{i,t}$ ). *Pertama*, apabila rincian atau komponen PDB berdasarkan penggunaan untuk tahun yang akan diproyeksi telah tersedia, maka  $PDB_{i,t}$  dapat menggunakan angka yang dilaporkan BPS. Pada saat studi ini dilakukan, BPS telah menerbitkan data PDB tahun 2013. Oleh karena itu, Faktor Pengali dihitung dengan menggunakan pendekatan pertama ini. *Kedua*, apabila rincian PDB untuk tahun yang akan diproyeksi belum tersedia, maka total PDB untuk tahun proyeksi,  $PDB_t$ , dapat dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi nominal, sebagai berikut:

$$g_t = (1 + r_t)(1 + \pi_t) - 1 \quad (3)$$

dan

$$PDB_t = PDB_{t-1}(1 + g_t) \quad (4)$$

dengan:

<sup>11</sup>Penjelasan lebih rinci mengenai Tabel I-O lihat publikasi yang diterbitkan BPS.



$g$  : Pertumbuhan PDB nominal;  
 $r$  : Pertumbuhan PDB riil;  
 $\pi$  : Tingkat inflasi.

Selanjutnya, PDB hasil proyeksi digunakan untuk menghitung rincian PDB dengan menggunakan tren proporsi setiap komponen pengeluaran (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, ekspor, dan impor). Misalnya, proporsi konsumsi rumah tangga dalam PDB cenderung menurun dari 72,5% di tahun 2005 menjadi 63,4% di tahun 2012. Tren ini diasumsikan akan berlanjut secara linier ke tahun 2013. Hasil proyeksi proporsi konsumsi rumah tangga ini kemudian dikalikan dengan PDB yang diproyeksikan menggunakan Persamaan (3) dan (4) untuk mendapatkan nilai konsumsi rumah tangga proyeksi tahun 2013.

### Proyeksi Rincian Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Rincian nilai konsumsi rumah tangga berdasarkan Tabel I-O 2008 diproyeksikan ke nilai konsumsi tahun 2013 dengan menggunakan Faktor Pengali,  $G_i$ , untuk masing-masing sektor pengeluaran, sebagai berikut:

$$C_{i,t} = G_i \times C_{i,0} \quad (5)$$

dengan:

$C_{i,t}$  : Nilai rincian atau konsumsi rumah tangga sektoral tahun proyeksi;  
 $C_{i,0}$  : Nilai rincian atau konsumsi rumah tangga sektoral tahun dasar.

Namun, total nilai konsumsi rumah tangga (66 sektor) hasil proyeksi dengan cara ini ternyata menghasilkan angka yang lebih besar dari total nilai konsumsi rumah tangga yang dilaporkan oleh BPS. Perbedaan ini muncul akibat adanya perbedaan jumlah sektor pada sektor usaha pada Tabel I-O dengan sektor usaha pada PDB berdasarkan lapangan usaha sehingga Faktor Pengali suatu sektor usaha diasumsi-

kan sama dengan subsektor penyusunnya. Selain itu, perbedaan ini juga disebabkan oleh adanya diskrepansi statistik. Adapun angka yang dijadikan sebagai dasar penghitungan proyeksi nilai konsumsi adalah nilai konsumsi pada PDB berdasarkan penggunaan.

Oleh sebab itu, proyeksi nilai rincian konsumsi rumah tangga (66 sektor) perlu disesuaikan sebagai berikut:

$$C_{i,t}^{Adj} = C_{i,t} \times \frac{C_t^2}{C_t^1} \quad (6)$$

dengan:

$C_{i,t}^{Adj}$  : Nilai rincian konsumsi rumah tangga tahun proyeksi setelah disesuaikan;  
 $C_t^1$  : Proyeksi nilai total konsumsi rumah tangga (66 sektor) dihitung menggunakan Faktor Pengali;  
 $C_t^2$  : Total nilai konsumsi rumah tangga di tahun proyeksi yang dilaporkan oleh BPS.

### Proyeksi Rincian *Input* Antara untuk Usaha

Proyeksi *input* antara untuk tahun 2013 dilakukan dengan mengalikan Faktor Pengali dengan nilai *input* antara untuk masing-masing sektor usaha pada Tabel I-O 2008. Karena tidak ada tolok ukur lain untuk mengoreksi total nilai *input* antara hasil proyeksi dengan metode ini (BPS tidak memublikasikan angka *input* antara untuk sektor usaha setiap tahun), maka hasil proyeksi nilai *input* antara untuk masing-masing sektor usaha tidak dilakukan penyesuaian lebih lanjut.

$$Int_{i,t} = G_i \times Int_{i,0} \quad (7)$$

dengan:

$Int_{i,t}$  : Total nilai *input* antara untuk masing-masing sektor usaha tahun proyeksi ( $t$ );  
 $Int_{i,0}$  : Total nilai *input* antara untuk masing-masing sektor usaha tahun dasar (0).

### Proyeksi Rincian Pembentukan Modal Tetap Bruto

Proyeksi rincian PMTB untuk tahun 2013 dilakukan dengan pendekatan yang sama dengan proyeksi rincian konsumsi akhir rumah tangga. Nilai PMTB berdasarkan Tabel I-O 2008 kemudian diproyeksikan ke tahun 2013 dengan menggunakan Faktor Pengali. Kemudian, nilai proyeksi rincian PMTB tahun 2013 disesuaikan sehingga total hasil proyeksi konsisten dengan total nilai PMTB yang dilaporkan oleh BPS.

$$I_{i,t} = G_i \times I_{i,0} \quad (8)$$

$$I_{i,t}^{Adj} = I_{i,t} \times \frac{I_t^2}{I_t^1} \quad (9)$$

dengan:

- $I_{i,t}$  : Nilai rincian atau komponen PMTB tahun proyeksi;
- $I_{i,0}$  : Nilai rincian atau komponen PMTB tahun dasar;
- $I_{i,t}^{Adj}$  : Nilai rincian PMTB tahun proyeksi setelah disesuaikan;
- $I_t^1$  : Proyeksi nilai total PMTB dihitung menggunakan Faktor Pengali;
- $I_t^2$  : Total nilai PMTB yang dilaporkan oleh BPS.

### Proporsi Kena Pajak Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Proporsi kena pajak konsumsi akhir rumah tangga ditentukan berdasarkan kebijakan yang saat ini berlaku mengenai pengenaan PPN dan PPNBM atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN serta BKP dan JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN atau tidak dipungut PPN. Selain itu, pertimbangan juga dilakukan terhadap konsumsi atas BKP atau JKP yang dibeli dari bukan PKP.

*JEPI Vol. 15 No. 1 Juli 2014*

### Proporsi Kena Pajak *Input* Antara Sektor Usaha

Seperti diilustrasikan pada Tabel 5, *input* antara kena pajak bagi pengusaha bukan PKP harus diperhitungkan sebagai basis PPN. Pengusaha bukan PKP ini secara efektif diperlakukan seperti halnya konsumen akhir. Di samping itu, ada juga PKP yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan PPN. Untuk PKP ini, hanya PPN Masukan yang proporsional dengan BKP dan JKP yang dihasilkan saja yang dapat dikreditkan. Sedangkan PPN Masukan atas *input* antara untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan PPN tidak dapat dikreditkan, sehingga PPN Masukan tersebut merupakan bagian penerimaan pemerintah.

Secara umum, proporsi kena pajak *input* antara sektor usaha dapat dihitung sebagai berikut:

$$P_j = (1 - P_{o,j}) \sum_{i=1}^n (P_{I,i} \times Int_{i,j,t}) / Int_{j,t} \quad (10)$$

dengan:

- $P_j$  : Proporsi kena pajak *input* antara sektor ekonomi  $j$ ;
- $P_{o,j}$  : Proporsi kena pajak barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi  $j$ ;
- $P_{I,i}$  : Proporsi kena pajak rincian *input* antara sektor ekonomi  $j$  dari sektor ekonomi  $i$ ;
- $Int_{i,j,t}$  : Nilai *input* antara sektor ekonomi  $j$  yang diperoleh dari sektor ekonomi  $i$ ;
- $Int_{j,t}$  : Total nilai *input* antara sektor ekonomi  $j$ .

Persamaan (10) memperlihatkan bahwa apabila sektor tersebut hanya menghasilkan barang dan jasa kena pajak ( $P_{o,j} = 1$ ), maka proporsi kena pajak *input* antaranya menjadi 0. Hal ini disebabkan karena semua PPN Masukan dapat dikreditkan. Apabila sektor tersebut hanya menghasilkan barang dan jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan PPN, maka semua *input* antara yang kena pajak merupa-

**Tabel 7:** Proporsi Kena Pajak Konsumsi Akhir Rumah Tangga

| Kriteria Sektor Usaha  | Proporsi Kena Pajak |
|--|---------------------|
| Semua item dalam satu sektor konsumsi dikenakan PPN  | 1                   |
| Semua item dalam satu sektor konsumsi tidak dikenakan PPN dan/atau mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan                                    | 0                   |
| Sebagian item dalam satu sektor konsumsi dikenakan PPN dan sebagian lagi tidak dikenakan PPN dan/atau mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan | Antara 0 sampai 1   |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

kan basis pajak yang harus diperhitungkan dalam menghitung potensi penerimaan.

Selain dari proporsi kena pajak rincian *input* antara dari masing-masing sektor dan proporsi kena pajak keluaran yang dihasilkan, faktor lain yang dipertimbangkan dalam penentuan  $P_j$  adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari usaha mikro dan kecil pada sektor  $j$ . Hal ini dengan asumsi bahwa usaha mikro dan kecil ini bukan merupakan PKP. Sehingga, dalam studi ini,  $(1 - P_{O,j})$  diasumsikan minimal sebesar proporsi nilai tambah usaha mikro dan kecil pada sektor  $j$ . Tabel 8 menampilkan proporsi nilai tambah usaha mikro dan kecil di masing-masing sektor utama.

### Proporsi Kena Pajak Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara umum, dalam sistem PPN jenis konsumsi, pembentukan modal tetap dan investasi secara efektif bukan merupakan basis PPN, karena PPN yang dibayarkan dalam rangka pengeluaran untuk PMTB merupakan PPN yang dapat dikreditkan. Oleh sebab itu, secara riil tidak ada PPN yang menjadi penerimaan pajak dari PMTB yang dilakukan untuk kegiatan usaha. Pengeluaran usaha yang termasuk pembentukan modal tetap antara lain pembangunan tempat usaha, pembelian mesin dan alat perlengkapan, serta pembelian ternak untuk tujuan pembiakan, pemerahan susu, dan sebagainya.

Namun, seperti halnya pengeluaran untuk *input* antara, PPN yang dibayarkan untuk

PMTB yang dilakukan oleh bukan PKP tetap tidak bisa dikreditkan sehingga pengeluaran untuk PMTB harus diperhitungkan sebagai basis PPN. Selain itu, pengeluaran untuk pembangunan perumahan yang merupakan konsumsi rumah tangga tercatat sebagai PMTB di dalam Tabel I-O, dan di Indonesia penyerahan rumah baru dengan kriteria tertentu merupakan objek PPN. Oleh karena itu, bagian PMTB yang merupakan pembangunan perumahan harus ditambahkan sebagai basis PPN.

Dalam menghitung proporsi kena pajak PMTB sektor konstruksi, angka yang dicatat dalam Tabel I-O hanya merupakan pengeluaran pembuatan bangunan. Nilai tanah tidak dicatat sebagai PMTB. Namun, dalam menghitung PPN atas penyerahan rumah baru, basis PPN merupakan nilai total properti, termasuk nilai tanah dan bangunan. Oleh sebab itu, dalam menghitung proporsi kena pajak untuk PMTB konstruksi, perlu diperhitungkan terlebih dahulu proporsi nilai pembangunan perumahan, dan kemudian asumsi persentase nilai tanah harus ditambahkan untuk menghitung basis data PPN. Dalam studi ini, nilai tanah diasumsikan sebesar 40% dari total nilai properti.

### Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan (*compliance rate*) dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dengan estimasi potensi penerimaan PPN dan PPnBM. Potensi penerimaan PPN dan PPnBM diperoleh dengan

**Tabel 8:** Proporsi Nilai Tambah Usaha Mikro dan Kecil

| Lapangan Usaha                                  | Omzet       |             |               |               |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|
|   | <Rp300 juta | <Rp600 juta | <Rp2,5 miliar | <Rp4,8 miliar |
| Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan | 88,0%       | 88,0%       | 88,2%         | 88,5%         |
| Pertambangan dan Penggalian                     | 11,5%       | 11,6%       | 11,8%         | 11,9%         |
| Industri Pengolahan                             | 12,9%       | 14,0%       | 21,6%         | 22,1%         |
| Listrik, Gas, dan Air Bersih                    | 0,4%        | 0,5%        | 1,4%          | 1,8%          |
| Konstruksi                                      | 11,4%       | 12,2%       | 17,4%         | 18,5%         |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran                | 27,3%       | 29,3%       | 42,3%         | 42,6%         |
| Pengangkutan dan Komunikasi                     | 20,0%       | 21,3%       | 29,2%         | 30,2%         |
| Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan        | 11,9%       | 13,1%       | 20,8%         | 22,8%         |
| Jasa-Jasa                                       | 32,0%       | 33,4%       | 41,7%         | 42,0%         |

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, diolah

asumsi tingkat kepatuhan 100%. Data yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan disini adalah data aktual penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2012 dibandingkan dengan potensi penerimaan PPN dan PPnBM yang diperoleh menggunakan hasil proyeksi Tabel I-O 2012. Selanjutnya, diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran PPN dan PPnBM tahun 2013 setara dengan tingkat kepatuhan di tahun 2012. Karena laporan statistik penerimaan pajak membagi sektor ekonomi menjadi 11 sektor utama, maka estimasi tingkat kepatuhan dilakukan dengan mengelompokkan potensi penerimaan yang dihitung berdasarkan Tabel I-O sesuai dengan 10 sektor ekonomi ini.

Penentuan sektor usaha pada *input* antara memiliki perbedaan dengan sektor usaha pada basis pajak dari konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB. Untuk menghitung potensi penerimaan, nilai *input* antara dialokasikan berdasarkan sektor yang memperoleh *input* antara tersebut. Sementara itu, untuk menghitung tingkat kepatuhan dan menghitung estimasi penerimaan, hasil perhitungan potensi dari *input* antara dialokasikan ke setiap sektor usaha yang berperan sebagai supplier.

Misalnya, total *input* antara yang digunakan oleh sektor padi tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan sektor padi. Untuk menghitung tingkat kepatuhan dan estimasi penerimaan, nilai *input* antara dibukukan ke dalam masing-masing sektor yang memasok *input* antara sektor pa-

di tersebut seperti sektor pestisida dan pupuk. Hal ini dikarenakan oleh PPN masukan atas *input* antara atas barang yang dibeli oleh sektor padi merupakan PPN keluaran bagi sektor pupuk dan pestisida dan pada sistem DJP penerimaan dari *input* antara ini diadministrasikan sebagai penerimaan sektor pupuk dan pestisida.

Untuk mengalokasikan *input* antara ke sektor yang memasok *input* antara tersebut diperlukan Faktor Pembagi *input* antara. Faktor Pembagi dihitung dengan cara: *Pertama*, menghitung proporsi kena pajak atas total *input* suatu sektor usaha seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. *Kedua*, mengalokasikan *input* antara yang merupakan basis PPN (dengan mempertimbangkan proporsi kena pajak *output* dari *supplier* dan proporsi bukan PKP sektor usaha yang memperoleh *input* antara) ke sektor yang memasok (*supplier*) *input* antara tersebut. *Ketiga*, menghitung Faktor Pembagi yaitu proporsi setiap sektor yang menjadi *supplier input* antara yang diperoleh dengan cara membagi *input* antara yang dihasilkan oleh suatu *supplier* dengan total *input* antara yang menjadi basis PPN. Potensi penerimaan sektoral dari *input* antara adalah angka yang dihasilkan dari total potensi dari *input* antara yang dibagi ke seluruh sektor usaha dengan menggunakan Faktor Pembagi.

Setelah potensi penerimaan PPN dibagi ke seluruh sektor usaha, maka dilakukan pengelompokan ke sektor yang lebih besar (11 sek-

tor). Formula untuk menghitung tingkat kepatuhan adalah sebagai berikut:

$$\varphi_i = \frac{R_i^A}{R_i^P} \quad (11)$$

dengan:

$\varphi_i$  : Tingkat kepatuhan pajak PPN dan PPnBM di sektor  $i$ ;

$R_i^A$  : Aktual penerimaan PPN dan PPnBM dari sektor  $i$ ;

$R_i^P$  : Potensi penerimaan PPN dan PPnBM dari sektor  $i$ .

## Hasil dan Analisis

### Proyeksi Tabel *Input-Output*

Tabel 15 menunjukkan hasil perhitungan Faktor Pengali. Seperti dijelaskan sebelumnya, Faktor Pengali digunakan untuk memproyeksikan komponen Tabel I-O, yaitu terkait dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan pemerintah, PMTB, dan *input* antara. Hasil proyeksi, selain untuk *input* antara, kemudian disesuaikan dengan total nilai agregat yang dilaporkan oleh BPS. Hasil proyeksi setelah disesuaikan dapat dilihat pada Tabel 16.

### Proporsi Kena Pajak Pertambahan Nilai

#### a. Permintaan Akhir Rumah Tangga

Hasil penghitungan Proporsi Kena Pajak dapat dilihat pada Tabel 16. Terdapat 2 sektor usaha yang memiliki Proporsi Kena Pajak antara 1 dan 0. Artinya, tidak semua bagian pada sektor tersebut merupakan BKP dan/atau JKP. Perhitungan Proporsi Kena Pajak untuk kedua sektor ekonomi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih.**  
Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2007,

sebagian *output* dari subsektor ini, yaitu subsektor listik dan air bersih, termasuk kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Namun, untuk subsektor listrik, terdapat bagian yang tidak mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, yaitu listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Pada tahun 2013, pendapatan PT. PLN yang bersumber rumah tangga dengan daya di atas 6.600 watt (R-3) adalah Rp3,7 triliun, sedangkan total pendapatan PT. PLN pada tahun tersebut adalah Rp153,4 triliun (PLN, 2013). Jadi, jumlah PDB dari listrik yang tidak mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan adalah sebesar 2,4%. Untuk sektor gas, proporsi kena pajak pada sektor tersebut adalah 100%. Berdasarkan data di atas, proporsi kena pajak secara keseluruhan atas Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih adalah sebesar 26,6% (Tabel 9).

- **Sektor Angkutan Udara.**

Jasa angkutan udara yang dikenakan PPN adalah jasa angkutan udara dalam negeri. Namun demikian, tidak semua jasa angkutan udara dalam negeri merupakan objek PPN karena terdapat pengecualian untuk jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. BPS mencatat proporsi keberangkatan luar negeri (penumpang dan barang) pada tahun 2012 adalah sekitar 25% dari total penerbangan (BPS, 2013a). Oleh karena itu, proporsi kena pajak sektor angkutan udara adalah sebesar 0,75 yaitu jumlah di luar penerbangan ke luar negeri.

Selain dua sektor usaha yang dijelaskan di atas, terdapat 2 sektor usaha yang seharusnya memiliki proporsi kena pajak antara 0 dan 1. Namun, proporsi yang dikenakan PPN dan proporsi yang tidak dikenakan PPN pada sektor tersebut tidak signifikan sehingga proporsi kena pajak yang digunakan adalah yang dominan pada masing-masing sektor tersebut.

**Tabel 9:** Perhitungan Proporsi Kena PPN Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

| Subsektor  | PDB Proyeksi 2013 | Persentase | Proporsi Kena Pajak | Proporsi Kena Pajak |        |
|------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--------|
|            |                   |            |                     | Agregat             | Sektor |
| Listrik    | 46.257            | 66%        | 0,024               | 1,60%               |        |
| Gas        | 17.380            | 25%        | 1,000               | 25,00%              | 26,60% |
| Air Bersih | 6.438             | 9%         | 0,000               | 0,00%               |        |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Sektor usaha yang dijelaskan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Sektor Angkutan Umum (Darat, Air, dan Kereta Api).**

PMK Nomor 80/PMK.03/2012 mengatur tentang jasa angkutan umum di darat dan air yang tidak dikenakan PPN. Untuk angkutan umum darat di jalan (mobil, truk, dan lain-lain), tidak dikenakan PPN apabila angkutan tersebut menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Kemudian, untuk angkutan umum darat (kereta api) dan angkutan air (kapal), tidak dikenakan PPN apabila angkutan tersebut digunakan tidak dengan cara disewa atau dicarter. Tabel I-O tidak menampilkan dengan rinci nilai konsumsi sektor angkutan umum ini. Oleh karena itu, proporsi kena pajak atas sektor ini menggunakan bagian yang dominan dari sektor ini yaitu 0.

- **Sektor Industri Alat Pengangkutan.**

PP Nomor 38/2003 mengatur tentang jenis BKP dan JKP tertentu yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN. Terdapat beberapa jenis BKP dan JKP tertentu yang terdapat pada peraturan ini (Tabel 13). Jenis BKP yang memiliki jumlah signifikan adalah alat angkutan berupa kapal laut, kereta api, dan pesawat. Namun demikian, jenis alat angkutan tersebut hampir seluruhnya tidak dimaksudkan untuk konsumsi rumah tangga, melainkan sebagai PMTB bagi perusahaan pelayaran, penerbangan, maupun perkeretaapian. Adapun hasil industri alat pengangkutan yang dikonsumsi rumah tangga sangat kecil, ti-

dak mencapai 1% dari total konsumsi dari sektor industri alat pengangkutan. Oleh karena itu, proporsi kena pajak sektor ini adalah 1.

Berdasarkan data Tabel I-O, fasilitas PPN yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN adalah PPN dibebaskan atas BKP dan JKP strategis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 31/2007 dan BKP dan JKP tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38/2003 sehingga diperhitungkan dalam perhitungan proporsi kena pajak. Fasilitas PPN yang lain dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dengan pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, selain rumah sederhana, kapal laut, kereta api, dan pesawat udara yang merupakan BKP tertentu yang dibebaskan PPN berdasarkan PP 38/2003, terdapat barang-barang seperti buku pelajaran, kitab suci, vaksin polio, dan lain-lain yang juga dibebaskan PPN berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. Namun, barang-barang tersebut tidak diperhitungkan karena memiliki porsi yang tidak terlalu signifikan pada konsumsi rumah tangga. *Kedua*, jumlah yang tidak signifikan juga terdapat pada BKP yang diserahkan kepada perwakilan negara asing/badan internasional sebagaimana diatur dalam PP 47/2013 dan penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu sebagaimana diatur dalam PP 28/2009. Kedua penyerahan ini mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN.

*Ketiga*, PPN tidak dipungut atas pemasukan barang ke kawasan berikat dan/atau kawasan bebas dimaksudkan untuk tujuan ekspor tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Barang yang dimasukkan ke kawasan berikat

dan/atau kawasan bebas dianggap sebagai ekspor. Sesuai dengan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), apabila barang tersebut dikeluarkan lagi ke daerah pabean, maka PPN atas barang tersebut wajib dilunasi. Dan *keempat*, PPN ditanggung pemerintah merupakan PPN yang dibayar pemerintah atas suatu jenis barang tertentu, seperti minyak goreng curah, pupuk subsidi, dan lain-lain. Namun demikian, jumlah PPN yang dibayarkan pemerintah tersebut merupakan penerimaan PPN. Oleh karena itu, jumlah PPN yang dibayarkan pemerintah tersebut tidak dikurangkan dari potensi penerimaan PPN.

## b. Pembentukan Modal Tetap Bruto

PMTB umumnya bukan merupakan basis PPN. Namun, terdapat pengecualian untuk sektor konstruksi, karena pembangunan perumahan yang diserahkan kepada rumah tangga sebagai konsumsi akhir, maka PMTB dalam bentuk perumahan yang memenuhi kriteria kena PPN harus diperhitungkan sebagai basis PPN<sup>12</sup>. Karena PMTB tidak memasukkan nilai tanah, sedangkan basis PPN atas penyerahan rumah baru termasuk nilai tanah, maka nilai tanah perlu ditambahkan ke dalam PMTB perumahan. BPS membagi konstruksi ke dalam tiga kategori, yaitu konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil, dan konstruksi khusus. Perumahan merupakan bagian dari konstruksi gedung. BPS mencatat proporsi konstruksi gedung pada tahun 2013 adalah sekitar 30% (BPS, 2013b). Dengan asumsi

<sup>12</sup>PMK Nomor 113/PMK.03/2014 mengatur tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Batasan tersebut di antaranya mengatur luas bangunan tidak lebih dari 36 m<sup>2</sup>, kepemilikan yang pertama, harga jual tidak melebihi batasan yang disesuaikan dengan zona dan tahun, dan lain-lain. Jadi, atas penyerahan rumah yang tidak memenuhi ketentuan ini merupakan penyerahan yang dipungut PPN.

PMTB konstruksi gedung adalah untuk pembangunan perumahan, dan 80% PMTB perumahan diserahkan oleh PKP, dan nilai tanah sebesar 40% dari total nilai penyerahan perumahan, maka Proporsi Kena Pajak PMTB sektor konstruksi diperkirakan sebesar  $0,3 \times 0,8 / 0,6 = 0,4$ .

## c. Input Antara

Hasil perhitungan Proporsi Kena Pajak untuk *input* antara menggunakan Persamaan (10) ditampilkan pada Tabel 16. Khusus untuk sektor industri alat pengangkutan, terdapat sekitar 10% dari *output* sektor tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN. Namun, *output* tersebut tidak berupa konsumsi rumah tangga, sehingga sektor ini memiliki proporsi kena pajak 1 pada permintaan akhir rumah tangga. Untuk menghitung proporsi *input* antara, jumlah *output* yang dibebaskan pada sektor industri alat pengangkutan ini harus diperhitungkan. Oleh karena itu, pada saat penghitungan proporsi kena pajak *input* antara, proporsi kena pajak sektor industri alat pengangkutan diubah dari 1 menjadi 0,9.

Selain itu, untuk sektor konstruksi, proporsi kena pajak adalah 0,4 pada basis pajak konsumsi akhir dan PMTB. Namun, pada saat penentuan proporsi kena pajak dari *input* antara, proporsi kena pajak sektor konstruksi diubah dari 0,4 menjadi 1. Hal ini disebabkan karena semua yang dihasilkan pada sektor konstruksi merupakan barang/jasa kena pajak sehingga semua PPN masukan dapat dikreditkan kecuali PPN masukan yang dibayar oleh bukan PKP.

## Proporsi Kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Proporsi Kena Pajak untuk PPnBM dihitung untuk tiga sektor usaha yang dikenakan PPnBM, yaitu: (i) sektor industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik; (ii) sektor industri alat pengangkutan dan perbaikannya; dan (iii) sektor perdagangan.

Untuk sektor industri alat pengangkutan, data yang digunakan bersumber dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) untuk kendaraan bermotor jenis mobil dan dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Khusus untuk data dari GAIKINDO, jumlah penjualan mobil dalam satu tahun telah dibagi ke dalam masing-masing spesifikasi kendaraan yang sesuai dengan pembagian spesifikasi kendaraan sebagaimana yang diatur dalam peraturan PPnBM. Sedangkan data dari AISI hanya menginformasikan jumlah penjualan seluruh spesifikasi sepeda motor dalam satu tahun. Oleh karena itu, perlu asumsi proporsi penjualan pada masing-masing spesifikasi kendaraan jenis sepeda motor.

Data GAIKINDO hanya menampilkan jumlah unit yang diproduksi untuk masing-masing spesifikasi kendaraan atau pangsa pasar berdasarkan unit yang terjual. Sedangkan data yang juga dibutuhkan untuk menghitung penerimaan PPnBM adalah nilai penjualan kendaraan tersebut. Untuk mendapatkan nilai penjualan pada masing-masing spesifikasi kendaraan, dipilih harga salah satu merek kendaraan yang dapat merepresentasikan suatu spesifikasi kendaraan.

Nilai konsumsi kendaraan bermotor jenis mobil atas ketiga sektor yang dikenakan PPnBM tidak sama dengan total nilai penjualan kendaraan berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan harga salah satu merek yang dapat merepresentasikan salah satu spesifikasi kendaraan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh nilai penjualan, pangsa pasar untuk masing-masing spesifikasi kendaraan berdasarkan nilai penjualan dikalikan dengan total konsumsi kendaraan bermotor jenis mobil ketiga sektor usaha tersebut. Kemudian, nilai penjualan untuk masing-masing spesifikasi kendaraan dikelompokkan berdasarkan tarif PPnBM sehingga diperoleh Proporsi Kena Pajak untuk masing-masing tarif PPnBM.

Untuk sepeda motor, terdapat tiga jenis spe-

sifikasi kendaraan yang dibagi berdasarkan isi silinder. Namun, penulis tidak menemukan data rinci penjualan sepeda motor berdasarkan isi silinder. Oleh karena, pengumpulan data diambil dari berbagai sumber seperti *Otomotifnet.com* (2013). Berdasarkan data tersebut dan hasil penelusuran dari berbagai sumber diperoleh proporsi jumlah unit penjualan sepeda motor yaitu, sekitar 99% dengan isi silinder di bawah 250cc dan sisanya dengan isi silinder di atas 250cc.

Sama halnya dengan penghitungan Proporsi Kena Pajak PPnBM untuk penjualan mobil, jumlah penjualan sepeda motor untuk masing-masing spesifikasi kemudian dikalikan dengan harga sepeda motor yang dapat merepresentasikan masing-masing spesifikasi kendaraan untuk memperoleh nilai pangsa pasar masing-masing spesifikasi sepeda motor. Nilai pangsa pasar tersebut kemudian dikalikan dengan total konsumsi sepeda motor dengan menggunakan data dari Tabel I-O 2000 yang menampilkan pengeluaran yang lebih rinci untuk 175 sektor.

Tabel 10 menampilkan hasil perhitungan proporsi pangsa pasar untuk masing-masing klasifikasi kendaraan dan tarif PPnBM. Mengingat keterbatasan data, maka diasumsikan ketiga sektor usaha yang dikenakan PPnBM memiliki proporsi pangsa pasar yang sama.

### Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2012 dengan Tingkat Kepatuhan 100%

Potensi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2012 dengan asumsi tingkat kepatuhan 100% diestimasi sekitar Rp635 triliun. Rincian hasil perhitungan dari potensi penerimaan PPN dan PPnBM dapat dilihat pada Tabel 17.

### Tingkat Kepatuhan

Untuk mendapatkan angka estimasi Tingkat Kepatuhan, maka potensi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2012 dibandingkan dengan angka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM



**Tabel 10:** Proporsi Pangsa Pasar Kendaraan Bermotor untuk Masing-Masing Tarif PPnBM

| Tarif PPnBM | Pangsa Pasar |
|-------------|--------------|
| 0%          | 64,50%       |
| 10%         | 21,30%       |
| 20%         | 9,50%        |
| 30%         | 0,80%        |
| 40%         | 2,00%        |
| 50%         | 0,60%        |
| 60%         | 0,40%        |
| 75%         | 0,80%        |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

tahun 2012. Angka Tingkat Kepatuhan untuk masing-masing sektor usaha dapat dilihat pada Tabel 18. Total tingkat kepatuhan pembayaran PPN dan PPnBM tahun 2012 adalah sekitar 53%.

### Estimasi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2013

Dengan menggunakan model estimasi penerimaan PPN dan PPnBM seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya, basis pajak yang terdiri dari hasil proyeksi konsumsi akhir, PMTB, dan *input* antara dikalikan dengan proporsi kena pajak, tingkat kepatuhan, dan tarif PPN atau PPnBM. Perhitungan ini menghasilkan estimasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013. Adapun perkiraan penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013 adalah Rp381 triliun. Sementara itu, penerimaan aktual PPN dan PPnBM tahun 2013 adalah Rp384 triliun. Dari hasil perkiraan ini dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan cukup akurat digunakan untuk memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM dengan tingkat kesalahan hanya sekitar 1%. Kertas kerja penghitungan estimasi penerimaan PPN dan PPnBM ini dapat dilihat pada Tabel 19–24.

### Simulasi Perubahan Kebijakan dan Perbaikan Administrasi PPN

#### a. Peningkatan Tarif PPN dari 10% Menjadi 11% dan 12%

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, model penghitungan estimasi penerimaan PPN dan PPnBM ini dapat digunakan untuk menghitung dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan PPN dan PPnBM. Pada bagian ini, dilakukan simulasi kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan 12%. Simulasi ini dilakukan dengan analisis statis tanpa mempertimbangkan perubahan perilaku PKP. Ketika tarif PPN dinaikkan menjadi 11% atau dalam hal ini dinaikkan 10% dari tarif sebelumnya, penerimaan PPN mengalami kenaikan sebesar tingkat kenaikan tarif PPN yaitu 10%. Namun, apabila digabung dengan penerimaan PPnBM, kenaikan penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan sebesar 9,4%. Angka agregat ini lebih kecil dari 10% karena tarif PPnBM tidak mengalami perubahan.

Kemudian, ketika tarif PPN dinaikkan menjadi 12% atau naik 20% dari tarif normal, kebijakan ini diestimasikan juga dapat menaikkan penerimaan PPN sebesar 20%. Sama halnya dengan simulasi sebelumnya, dampak pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM yang dihasilkan sedikit lebih kecil dari tingkat kenaikan tarif PPN yang diterapkan karena tarif PPnBM tidak mengalami perubahan. Hasil rinci potensi penerimaan PPN dan PPnBM

**Tabel 11:** Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM untuk Beberapa Tarif PPN

| Tarif PPnBM | Potensi Penerimaan PPN & PPnBM | Potensi Peningkatan terhadap Aktual Penerimaan |
|-------------|--------------------------------|--|
| 10%         | Rp381 Triliun                  | -  |
| 11%         | Rp417 Triliun                  | 9,4%   |
| 12%         | Rp453 Triliun                  | 18,8%  |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

yang dihasilkan dari kedua simulasi ini dapat dilihat pada Tabel 11.

### b. Penghapusan Fasilitas PPN dan PPN Tidak Dikenakan/Dibebaskan

Penghapusan seluruh fasilitas PPN (dibebaskan PPN dan tidak dipungut PPN) dan PPN Tidak Dikenakan termasuk menurunkan batas peredaran usaha untuk wajib daftar sebagai PKP akan menyebabkan semua usaha dapat mengkreditkan seluruh PPN Masukan. Dengan kata lain, semua PPN atas *input* antara dapat dikreditkan, dan hanya konsumen akhir yang secara efektif membayar PPN.

Simulasi dari penghapusan fasilitas atas PPN dan PPN Tidak Dikenakan atau PPN Dibebaskan memberikan hasil sebagai berikut. *Pertama*, penerimaan PPN yang bersumber dari konsumsi meningkat sekitar 83% dibandingkan dengan estimasi penerimaan PPN sebelum asumsi kebijakan ini diterapkan. *Kedua*, tidak ada potensi penerimaan PPN dari *input* antara kepada PKP, karena semua PPN masukan atas *input* antara dapat dikreditkan. Dan *ketiga*, secara total, dengan diberlakukannya kebijakan ini, terjadi penurunan penerimaan PPN dan PPnBM sekitar 5,3%, yaitu dari Rp381 triliun menjadi Rp361 triliun.

### Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Peningkatan tingkat kepatuhan dari posisi sekarang di bawah 50% menjadi 70% diperkirakan akan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM menjadi Rp518 triliun, atau peningkatan sebesar kurang lebih 35% dari penerimaan saat ini di tahun 2013. Peningkatan kepatuhan ini dapat dilakukan antara lain dengan

cara memperkuat sistem administrasi perpajakan dengan menyederhanakan proses bisnis dan membatasi pengecualian. Perluasan basis pajak melalui pengurangan jumlah BKP/JKP yang dibebaskan atau tidak dikenakan PPN dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan PPN, karena hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk perlakuan khusus yang dapat menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun DJP.

### Implikasi Studi

Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM secara total adalah sekitar 53%. Dalam hal ini, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi penerimaan PPN dan PPnBM. Dari studi ini dapat diketahui tingkat kepatuhan sektoral. Sektor manufaktur merupakan penyumbang terbesar penerimaan PPN. Saat ini, tingkat kepatuhan sektor manufaktur adalah sekitar 60% dengan jumlah penerimaan sekitar Rp176 triliun. Apabila kepatuhan sektor manufaktur bisa dinaikkan 5%, maka tambahan penerimaan dari sektor ini dapat mencapai Rp15 triliun.

Selain itu, penerimaan dari sektor konstruksi sangat potensial untuk diintensifkan. Tingkat kepatuhan sektor konstruksi baru mencapai angka sekitar 30%. Apabila sektor ini dapat lebih terawasi sehingga tingkat kepatuhan dapat mencapai 50%, maka kenaikan penerimaan dari sektor konstruksi dapat mencapai sekitar Rp21 triliun. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan merupakan upaya yang lebih tepat untuk meningkatkan penerimaan PPN diban-

**Tabel 12:** Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM untuk Berbagai Tingkat Kepatuhan

| Tingkat Kepatuhan | Potensi Penerimaan PPN & PPnBM | Potensi Penerimaan terhadap Aktual Penerimaan |
|-------------------|--------------------------------|---|
| 60%               | Rp461 Triliun                  | +20%  |
| 70%               | Rp518 Triliun                  | +35%  |
| 80%               | Rp579 Triliun                  | +51%  |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

dingkan dengan menaikkan tarif PPN.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan PPN adalah dengan menerbitkan aturan penggunaan faktur pajak elektronik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya faktur pajak fiktif. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2014 untuk beberapa PKP tertentu. Dampak kebijakan ini terhadap peningkatan kepatuhan dapat diukur dengan menggunakan model ini.

Kebijakan pemerintah menaikkan batasan peredaran usaha menjadi Rp4,8 miliar setahun untuk wajib mendaftarkan sebagai PKP diperkirakan efektif untuk meningkatkan kepatuhan PKP. Apabila sistem administrasi PPN telah dibenahi dengan maksimal, seperti penerapan faktur pajak elektronik bagi seluruh PKP, maka batasan peredaran usaha tersebut direkomendasikan untuk diturunkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh penerimaan dari nilai tambah yang dihasilkan oleh pengusaha dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar.

Untuk mengawasi kepatuhan PKP, selain melakukan pengawasan dengan mencocokkan PPN Keluaran dengan PPN Masukan (PK-PM), DJP juga perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif dengan melakukan pengawasan terhadap tingkat pertambahan nilai untuk masing-masing PKP. Apabila suatu PKP sudah berproduksi secara normal, maka agar PKP tersebut dapat beroperasi secara berkesinambungan, PKP tersebut secara rata-rata untuk suatu periode tertentu harus menghasilkan suatu nilai tambah yang positif. Apabila PKP tersebut tidak melakukan ekspor atau menyerahkan BKP atau JKP yang tidak dipungut PPN, maka rata-rata rasio PK terhadap PM untuk suatu periode tertentu (beberapa bu-

lan hingga 1 tahun pajak atau lebih, tergantung pada kemampuan keuangan PKP) harus lebih dari 1. Sektor dan besar usaha tertentu diperkirakan akan menunjukkan rentang rasio PK/PM tertentu yang dapat dijadikan dasar evaluasi risiko kepatuhan PKP.

Apabila rasio PK/PM menunjukkan angka lebih kecil dari satu untuk suatu periode yang berkelanjutan, maka PKP tersebut memiliki indikasi tidak patuh. Dalam kondisi normal, rasio perbandingan kurang dari satu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga beli sehingga PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran. Oleh karena itu, apabila perusahaan tersebut tetap beroperasi normal pada kondisi rasio perbandingan kurang dari satu, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran PPN.

Saat ini, peraturan PPN mengatur adanya pembeli yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN (*reverse charge*) yaitu Bendahara Pemerintah, Kontraktor Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemungut PPN memiliki kewajiban memungut dan menyetor PPN atas penyerahan yang dilakukan oleh rekanan kepada pemungut PPN tersebut. Untuk meningkatkan kepatuhan, DJP dapat memperluas PKP yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Namun, karena penetapan PKP sebagai Pemungut PPN ini akan menambah beban administrasi bagi PKP yang ditunjuk dan implementasi *reverse charge* dapat menambah permohonan restitusi, maka DJP perlu mempermudah sistem pelaporan oleh Pemungut PPN dan mempercepat proses restitusi bagi PKP yang cenderung patuh dan telah dikategorikan berisiko rendah.

**Tabel 13:** Fasilitas PPN dan PPnBM

| No.                          | Dasar Hukum         | Hal yang Diatur  |
|------------------------------|---------------------|--|
| <b>Dibebaskan PPN</b>        |                     |  |
| 1                            | PP 31 Tahun 2007    | Mengatur tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik</li> <li>- Makanan ternak dan unggas</li> <li>- Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pe-<br/>nangkaran, atau perikanan</li> <li>- Barang hasil pertanian</li> <li>- Air bersih yang dialiri pipa perusahaan air minum</li> <li>- Listrik, kecuali di atas 6.600 watt untuk perumahan</li> <li>- Rumah susun sederhana milik</li> </ul>   |
| 2                            | PP 38 Tahun 2003    | Mengatur tentang PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang dan jasa kena pajak tertentu, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah sederhana</li> <li>- Senjata, amunisi, dan alat-alat angkutan untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI, dan POLRI</li> <li>- Vaksin polio</li> <li>- Buku pelajaran dan kitab suci</li> <li>- Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan pe-<br/>nyebaran yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional</li> <li>- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat kese-<br/>lamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional</li> <li>- Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia</li> <li>- Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI</li> <li>- Jasa kena pajak tertentu yang diterima oleh perusahaan angkutan laut dan angkutan udara nasional</li> </ul> |
| 3                            | PP 47 Tahun 2013    | Mengatur tentang PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan</li> <li>- Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional</li> </ul>   |
| 4                            | PP 28 Tahun 2009    | Mengatur tentang PPN dibebaskan atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri.  |
| <b>Tidak Dipungut PPN</b>    |                     |  |
| 5                            | PMK 120/PMK.04/2013 | Mengatur tentang PPN tidak dipungut atas pemasukan dan pengeluaran barang di Ka-<br>wasan Berikat.   |
| 6                            | KEP-229/PJ/2001     | Mengatur tentang PPN tidak dipungut atas impor, pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke/dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).  |
| 7                            | PP 25 Tahun 2001    | Mengatur tentang PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.  |
| 8                            | PP 10 Tahun 2012    | Mengatur tentang perlakuan perpajakan di kawasan bebas. Pada aturan ini terdapat fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut dan PPN dan PPnBM dibebaskan.  |
| 9                            | PMK 70/PMK.011/2013 | Perlakuan PPN dan PPnBM atas barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.  |
| <b>Ditanggung Pemerintah</b> |                     |  |
| 10                           | KMK 388/KMK.01/1998 | Mengatur tentang PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan pupuk Urea, SP-36 dan ZA bersubsidi untuk Sub-Sektor Tanaman pangan, Perikanan, Peternakan, dan Perke-<br>bunan Rakyat.   |

Sumber: dari Berbagai Sumber, diolah

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, model analisis penerimaan PPN yang berbasis Tabel I-O yang dikembangkan pada studi ini dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penerimaan PPN dan PPnBM, tingkat kepatuhan dan dampak penerimaan atas perubahan kebijakan PPN dan PPnBM. Hasil estimasi penerimaan PPN dan PPnBM untuk tahun 2013 mendekati nilai realisasi penerimaan aktual. *Kedua*, perhitungan tingkat kepatuhan menghasilkan angka sekitar 53%. *Ketiga*, peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM akan memberikan hasil yang lebih signifikan melalui perbaikan administrasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, dibandingkan dengan peningkatan tarif PPN. Dan *keempat*, penghapusan seluruh fasilitas PPN (Dibebaskan PPN, Tidak Dipungut PPN, dan PPN Tidak Dikenakan), selain dapat meningkatkan beban administrasi, diperkirakan untuk sektor ekonomi tertentu justru akan menurunkan penerimaan PPN.

## Daftar Pustaka

- [1] BPS. (2013a). *Jumlah Keberangkatan Penumpang dan Barang di Bandara Indonesia Tahun 1999–2013* <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1404> (Diakses 17 Februari 2014).
- [2] BPS. (2013b). *Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Jenis Pekerjaan, 2004–2013 (Juta Rupiah)* <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/918> (Diakses 17 Februari 2014).
- [3] BPS. (2009). *Tabel Input Output Indonesia Updating 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [4] Glenday, Shukla, & Sugana. (2010). *Tax Analysis and Revenue Forecasting: Techniques and Applications*. Duke Center for International Development, Duke University.
- [5] Jenkins, G. P. & Kuo, C-Y. (1996). A VAT Revenue Simulation Model for Tax Reform in Developing Countries. *Development Discussion Paper, 522*. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development. <http://www.cid.harvard.edu/hiid/522.pdf> (Diakses 15 Desember 2013).
- [6] Kementerian Keuangan RI. (2009). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1983–2013*. Dalam A. Abimanyu & A. Megantara (Editor), *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- [7] Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2013). *Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar*. [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_phocadownload&view=file&id=335:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2012-2013&Itemid=93](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=335:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2012-2013&Itemid=93) (Diakses 17 Februari 2014).
- [8] Marks, S. V. (2003). *The Value-Added Tax in Indonesia: The Impact of Sectoral Exemptions on Revenue Potential and Effective Tax Rates*. Technical Report. Submitted by Nathan/Checchi Joint Venture, Partnership for Economic Growth (PEG) Project, Under USAID Contract #497-C-00-98-00045-00 (Project #497-0357). Bappenas & USAID/ECG Jakarta, Indonesia. [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PNACS917.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACS917.pdf) (Diakses 25 Nopember 2013).
- [9] Otomotifnet.com (2013). *Jumlah Penjualan Motor Sport 250 cc, Ninja 250 Masih Memimpin* <http://motor.otomotifnet.com/read/2013/04/23/340373/30/9/Jumlah> (Diakses 15 Desember 2013).
- [10] Pellechio, A. J., & Hill, C. B. (1996). *Equivalence of the Production and Consumption Methods of Calculating the Value-Added Tax Base: Application in Zambia*. *IMF Working Paper, WP/96/67*. Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9667.pdf> (Diakses 15 Desember 2013).
- [11] PLN. (2013). *Statistik PLN 2013*. <http://www.pln.co.id/dataweb/STAT/STAT2013IND.pdf> (Diakses 17 Februari 2014).
- [12] USAID. (2013) *Collecting Taxes: 2012/2013 Data*. <http://egateg.usaid.gov/collecting-taxes> (Diakses 17 Februari 2014).
- [13] World Bank. (2013). *Price Level Ratio of PPP Conversion Factor (GDP) to Market Exchange Rate*. <http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPPC.RF> (Diakses 15 Desember 2013).

### Peraturan Perpajakan:

- [14] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [15] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk,

**Tabel 14:** Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM

| Tarif | Jumlah Penumpang         | Jenis Kendaraan   | Jenis Motor Bakar  | Jenis Sistem Penggerak  | Kapasitas Silinder           |
|-------|--------------------------|---|--|---|------------------------------|
| 10%   | 10–15 orang              | -   | cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semidiesel)   | -   | Semua kapasitas isi silinder |
|       | Kurang dari 10 orang     | Selain sedan atau <i>station wagon</i>                                | cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semidiesel)   | sistem 1 gardan penggerak (4x2)                                       | Kurang dari 1.500 cc         |
| 20%   | Kurang dari 10 orang     | selain sedan atau <i>station wagon</i>                                | cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semidiesel)   | sistem 1 gardan penggerak (4x2)                                       | 1.500–2.500 cc               |
|       | Lebih dari 3 orang       | • kabin ganda ( <i>double cabin</i> )                                 | cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semidiesel)   | • 1 gardan penggerak (4x2) atau                                       | Semua kapasitas isi silinder |
|       |                          | • kendaraan bak terbuka atau bak tertutup<br>• masa kurang dari 5 ton |  | • dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4)                              |                              |
| 30%   | Kurang dari 10 penumpang | sedan atau <i>station wagon</i>                                       | cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semidiesel)   | -   | Kurang dari 1.500 cc         |
|       | Kurang dari 10 penumpang | selain sedan atau <i>station wagon</i>                                | cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semidiesel)   | 2 (dua) gardan penggerak (4x4)  | Kurang dari 1.500 cc         |
| 40%   | Kurang dari 10 orang     | selain sedan atau <i>station wagon</i>                                | cetus api  | 1 (satu) gardan penggerak (4x2)                                       | 2.500–3.000 cc               |
|       | kurang dari 10 orang     | cetus api   | • sedan atau <i>station wagon</i><br>• selain sedan atau <i>station wagon</i>                                | 2 (dua) gardan penggerak (4x4)  | 1.500–3.000 cc               |
|       | kurang dari 10 orang     | nyala kompresi (diesel atau semi diesel)                              | • sedan atau <i>station wagon</i><br>• selain sedan atau <i>station wagon</i>                                | 2 (dua) gardan penggerak (4x4)  | 1.500–2.500 cc.              |
|       |                          |   |  |   |                              |
| 50%   | -                        | -   | semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf  | -   | -                            |
| 60%   | -                        | -   | kendaraan bermotor beroda dua  | -   | 250–500 cc                   |
|       | -                        | -   | kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu | -   | -                            |
| 75%   | kurang dari 10 orang     | cetus api   | • sedan atau <i>station wagon</i><br>• selain sedan atau <i>station wagon</i>                                | • 1 (satu) gardan penggerak (4x2)<br>• 2 (dua) gardan penggerak (4x4) | Lebih dari 3.000 cc          |
|       | kurang dari 10 orang     | nyala kompresi (diesel atau semi diesel)                              | -sedan atau <i>station wagon</i><br>• selain sedan atau <i>station wagon</i>                                 | • 1 (satu) gardan penggerak (4x2)<br>• 2 (dua) gardan penggerak (4x4) | Lebih dari 2.500 cc          |
|       | -                        | -   | -  | kendaraan bermotor beroda 2 (dua)                                     | Lebih dari 500 cc            |
|       | -                        | -   | -  | trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah   | -                            |
|       |                          |   |  |   |                              |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: gardan adalah bagian atau komponen mobil yang berfungsi memindahkan tenaga motor ke roda lewat persneling

**Tabel 15:** Hasil Perhitungan Faktor Pengali

| LAPANGAN USAHA   | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | FAKTOR PENGALI |             |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
|  |           |           |           |           |           |           | 2012           | 2013        |
| (1)  | (2)       | (3)       | (4)       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)=(6)/(2)    | (9)=(7)/(2) |
| PRODUK DOMESTIK BRUTO                                    | 5.088.832 | 5.764.620 | 6.625.773 | 7.618.866 | 8.460.409 | 9.083.972 | 1,66           | 1,79        |
| Minyak dan Gas   | 521.055   | 464.791   | 504.9     | 624.902   | 637.105   | 667.932   | 1,22           | 1,28        |
| Tidak Termasuk Minyak dan Gas                            | 4.567.777 | 5.299.829 | 6.120.873 | 6.993.964 | 7.823.303 | 8.416.040 | 1,71           | 1,84        |
| PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN          | 716.656   | 857.2     | 985.471   | 1.091.447 | 1.190.412 | 1.311.037 | 1,66           | 1,83        |
| Tanaman Bahan Makanan                                    | 349.795   | 419.195   | 482.377   | 529.968   | 574.33    | 621.833   | 1,64           | 1,78        |
| Tanaman Perkebunan                                       | 105.961   | 111.38    | 136.049   | 153.709   | 159.754   | 175.248   | 1,51           | 1,65        |
| Peternakan   | 83.276    | 104.884   | 119.372   | 129.298   | 146.09    | 165.163   | 1,75           | 1,98        |
| Kehutanan  | 40.375    | 45.12     | 48.29     | 51.781    | 54.907    | 56.994    | 1,36           | 1,41        |
| Perikanan  | 137.25    | 176.621   | 199.383   | 226.691   | 255.332   | 291.799   | 1,86           | 2,13        |
| PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN                              | 541.334   | 592.062   | 719.71    | 879.505   | 970.6     | 1.020.773 | 1,79           | 1,89        |
| Pertambangan Minyak dan Gas Bumi                         | 283.283   | 254.949   | 290.467   | 371.823   | 382.697   | 401.139   | 1,35           | 1,42        |
| Pertambangan Bukan Migas                                 | 195.286   | 254.243   | 332.97    | 398.55    | 464.012   | 477.821   | 2,38           | 2,45        |
| Penggalian   | 62.765    | 82.87     | 96.273    | 109.132   | 123.89    | 141.813   | 1,97           | 2,26        |
| INDUSTRI PENGOLAHAN                                      | 1.376.442 | 1.477.544 | 1.599.073 | 1.806.141 | 1.972.847 | 2.152.593 | 1,43           | 1,56        |
| Industri Migas   | 237.772   | 209.842   | 214.433   | 253.079   | 254.408   | 266.794   | 1,07           | 1,12        |
| Industri Bukan Migas                                     | 1.138.670 | 1.267.702 | 1.384.640 | 1.553.062 | 1.718.439 | 1.885.799 | 1,51           | 1,66        |
| • Industri Makanan, Minuman dan Tembakau                 | 346.186   | 420.363   | 465.368   | 546.752   | 624.371   | 674.269   | 1,80           | 1,95        |
| • Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki      | 104.83    | 116.547   | 124.204   | 143.385   | 156.493   | 172.423   | 1,49           | 1,64        |
| • Industri Kayu dan Produk Lainnya                       | 73.196    | 80.197    | 80.542    | 84.481    | 85.802    | 94.651    | 1,17           | 1,29        |
| • Industri Produk Kertas dan Percetakan                  | 51.912    | 61.155    | 65.822    | 69.34     | 66.771    | 72.781    | 1,29           | 1,40        |
| • Industri Produk Ppuk, Kimia dan Karet                  | 154.117   | 162.879   | 176.212   | 189.7     | 216.383   | 230.236   | 1,40           | 1,49        |
| • Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam       | 40.179    | 43.531    | 45.515    | 50.791    | 58.018    | 63.974    | 1,44           | 1,59        |
| • Industri Logam Dasar Besi dan Baja                     | 29.213    | 26.807    | 26.854    | 31.101    | 33.476    | 35.746    | 1,15           | 1,22        |
| • Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi | 329.912   | 346.404   | 389.6     | 426.234   | 465.537   | 529.829   | 1,41           | 1,61        |
| • Produk Industri Pengolahan Lainnya                     | 9.126     | 9.819     | 10.524    | 11.278    | 11.588    | 11.89     | 1,27           | 1,30        |
| LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH                             | 40.889    | 46.682    | 49.119    | 56.789    | 65.125    | 70.075    | 1,59           | 1,71        |
| Listrik  | 25.859    | 28.417    | 30.45     | 36.486    | 42.105    | 46.257    | 1,63           | 1,79        |
| Gas  | 9.817     | 13.028    | 13.354    | 14.65     | 16.916    | 17.38     | 1,72           | 1,77        |
| Air Bersih   | 5.213     | 5.237     | 5.315     | 5.653     | 6.104     | 6.438     | 1,17           | 1,23        |
| KONSTRUKSI   | 419.712   | 555.194   | 660.891   | 754.484   | 860.965   | 907.267   | 2,05           | 2,16        |
| PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN                         | 831.631   | 902.917   | 1.061.409 | 1.220.094 | 1.364.145 | 1.301.506 | 1,64           | 1,57        |
| Perdagangan Besar dan Eceran                             | 551.344   | 586.111   | 703.566   | 827.924   | 927.057   | 1.053.207 | 1,68           | 1,91        |
| Hotel dan Restoran                                       | 140.144   | 158.403   | 178.921   | 196.085   | 218.544   | 248.299   | 1,56           | 1,77        |
| • Hotel  | 18.9      | 20.782    | 23.877    | 26.377    | 31.776    | 39.287    | 1,68           | 2,08        |
| • Restoran   | 121.244   | 137.621   | 155.045   | 169.708   | 186.768   | 209.012   | 1,54           | 1,72        |
| PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI                              | 312.19    | 353.741   | 423.172   | 491.283   | 549.116   | 636.888   | 1,76           | 2,04        |
| Pengangkutan   | 171.247   | 182.909   | 217.318   | 254.52    | 287.356   | 344.485   | 1,68           | 2,01        |
| • Angkutan Jal   | 1.65      | 1.905     | 2.26      | 2.367     | 2.478     | 2.687     | 1,50           | 1,63        |
| • Angkutan Jalan Raya                                    | 100.5     | 103.528   | 121.863   | 140.604   | 152.548   | 184.216   | 1,52           | 1,83        |
| • Sungai, Danau, Laut, dan Penyeberangan                 | 21.59     | 22.02     | 23.848    | 26.236    | 28.428    | 32.332    | 1,32           | 1,50        |
| - Angkutan Laut  | 16.019    | 15.813    | 16.93     | 18.59     | 19.662    | 21.656    | 1,23           | 1,35        |
| - Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan              | 5.57      | 6.207     | 6.918     | 7.646     | 8.766     | 10.676    | 1,57           | 1,92        |
| - Angkutan Udara   | 19.666    | 24.248    | 34.781    | 46.711    | 62.212    | 79.038    | 3,16           | 4,02        |
| - Jasa Penunjang Angkutan                                | 27.841    | 31.208    | 34.566    | 38.603    | 41.69     | 46.212    | 1,50           | 1,66        |
| Komunikasi   | 140.943   | 170.832   | 205.854   | 236.763   | 261.759   | 292.403   | 1,86           | 2,07        |
| KEUANGAN, REAL ESTATE, DAN JASA PERUSAHAAN               | 368.13    | 405.164   | 466.564   | 535.153   | 598.523   | 683.01    | 1,63           | 1,86        |
| Jasa Keuangan  | 170.076   | 184.409   | 209.597   | 241.142   | 275.574   | 320.997   | 1,62           | 1,89        |
| • Bank   | 125.515   | 132.187   | 146.915   | 166.49    | 191.095   | 224.973   | 1,52           | 1,79        |
| • Lembaga Keuangan Tanpa Bank                            | 41.753    | 49.22     | 59.201    | 70.576    | 79.897    | 90.909    | 1,91           | 2,18        |
| • Jasa Penunjang Keuangan                                | 2.807     | 3.002     | 3.481     | 4.076     | 4.582     | 5.115     | 1,63           | 1,82        |
| Real Estate and Jasa Perusahaan                          | 198.054   | 220.755   | 256.967   | 294.011   | 322.949   | 362.013   | 1,63           | 1,83        |
| • Real Estate  | 132.024   | 145.261   | 168.221   | 191.929   | 209.522   | 232.222   | 1,59           | 1,76        |
| • Jasa Perusahaan  | 66.03     | 75.494    | 88.746    | 102.082   | 113.427   | 129.791   | 1,72           | 1,97        |
| JASA-JASA  | 481.848   | 574.116   | 660.366   | 783.971   | 888.676   | 1.000.823 | 1,84           | 2,08        |
| Pemerintahan Umum  | 257.548   | 318.58    | 359.841   | 432.785   | 485.535   | 541.191   | 1,89           | 2,10        |
| • Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan               | 157.727   | 195.129   | 220.543   | 266.248   | 300.158   | 333.961   | 1,90           | 2,12        |
| • Jasa Pemerintahan Lainnya                              | 99.821    | 123.451   | 139.298   | 166.538   | 185.377   | 207.23    | 1,86           | 2,08        |
| Swasta   | 224.301   | 255.536   | 300.525   | 351.185   | 403.141   | 459.632   | 1,80           | 2,05        |
| • Jasa Sosial Masyarakat                                 | 83.835    | 97.489    | 114.238   | 134.727   | 158.745   | 185.226   | 1,89           | 2,21        |
| • Jasa Hiburan dan Rekreasi                              | 13.028    | 14.807    | 17.345    | 20.456    | 23.058    | 26.413    | 1,77           | 2,03        |
| • Jasa Perorangan dan Rumah Tangga                       | 127.438   | 143.24    | 168.942   | 196.003   | 221.338   | 247.993   | 1,74           | 1,95        |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

JEPI Vol. 15 No. 1 Juli 2014

Tabel 16: Proyeksi Nilai Konsumsi Akhir, PMTB, dan Input Antara Tahun 2012 dan 2013, serta Proporsi Kena Pajak

| Kode | Lapangan Usaha                                     | Proyeksi 2012 |           |           |         | Proyeksi 2013 |           |          |       | Proporsi Kena Pajak |              |
|------|--|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|-------|---------------------|--------------|
|      |  | Nilai         |           | Konsumsi  |         | Nilai         |           | Konsumsi |       | PMTB                | Input Antara |
|      |  | Antara        | PMTB      | Antara    | Akhir   | Antara        | Akhir     | Antara   | Akhir |                     |              |
| 1    | Padi   | 0             | 0         | 71.138    | 0       | 0             | 0         | 0        | 0     | 0,00                | 0,51         |
| 2    | Tanaman Kacang-Kacangan                            | 11.947        | 0         | 4.928     | 13.087  | 0             | 0         | 0        | 0     | 0,00                | 0,45         |
| 3    | Jagung   | 56.234        | 0         | 29.206    | 61.368  | 0             | 0         | 0        | 0     | 0,00                | 0,43         |
| 4    | Tanaman Umbi-Umbian                                | 28.115        | 0         | 6.310     | 30.682  | 0             | 0         | 0        | 0     | 0,00                | 0,35         |
| 5    | Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan                      | 198.058       | 9         | 36.959    | 216.142 | 9             | 40.016    | 0        | 0     | 0,00                | 0,50         |
| 6    | Tanaman Bahan Makanan Lainnya                      | 1.028         | 0         | 447       | 1.122   | 0             | 484       | 0        | 0     | 0,00                | 0,85         |
| 7    | Karet  | 0             | 323       | 18.598    | 0       | 350           | 20.402    | 0        | 0     | 0,00                | 0,58         |
| 8    | Tebu   | 82            | 0         | 4.851     | 90      | 0             | 5.321     | 0        | 0     | 0,00                | 0,76         |
| 9    | Kelapa   | 10.055        | 368       | 7.512     | 11.118  | 399           | 8.240     | 0        | 0     | 0,00                | 0,74         |
| 10   | Kelapa Sawit                                       | 0             | 1.041     | 51.969    | 0       | 1.129         | 57.01     | 0        | 0     | 0,00                | 0,65         |
| 11   | Tembakau   | 923           | 0         | 3.198     | 1.021   | 0             | 3.508     | 0        | 0     | 0,00                | 0,81         |
| 12   | Kopi   | 841           | 287       | 6.198     | 929     | 311           | 6.799     | 0        | 0     | 0,00                | 0,67         |
| 13   | The  | 172           | 19        | 239       | 190     | 20            | 262       | 0        | 0     | 0,00                | 0,84         |
| 14   | Cengkeh  | 3             | 64        | 784       | 3       | 69            | 860       | 0        | 0     | 0,00                | 0,86         |
| 15   | Hasil Tanaman Serat                                | 0             | 0         | 169       | 0       | 0             | 185       | 0        | 0     | 0,00                | 0,77         |
| 16   | Hasil Tanaman Perkebunan Lainnya                   | 1.560         | 96        | 9.199     | 1.725   | 104           | 10.091    | 0        | 0     | 0,00                | 0,79         |
| 17   | Tanaman Lainnya                                    | 3.267         | 0         | 8.727     | 3.565   | 0             | 9.449     | 0        | 0     | 0,00                | 0,49         |
| 18   | Peternakan   | 34.312        | 1.302     | 46.976    | 39.099  | 1.455         | 53.109    | 0        | 0     | 0,00                | 0,63         |
| 19   | Penotongan Hewan                                   | 78.567        | 0         | 85.900    | 89.530  | 0             | 97.114    | 0        | 0     | 0,00                | 0,13         |
| 20   | Unggas dan Hasil-Hasilnya                          | 92.787        | 0         | 104.559   | 105.733 | 0             | 118.210   | 0        | 0     | 0,00                | 0,89         |
| 21   | Kayu   | 2.355         | 0         | 13.708    | 2.464   | 0             | 14.229    | 0        | 0     | 0,00                | 0,60         |
| 22   | Hasil Hutan Lainnya                                | 3.779         | 0         | 2.813     | 3.954   | 0             | 2.920     | 0        | 0     | 0,00                | 0,72         |
| 23   | Perikanan  | 178.012       | 0         | 90.078    | 205.051 | 0             | 102.943   | 0        | 0     | 0,00                | 0,50         |
| 24   | Penambangan Batubara dan Bijih Logam               | 0             | 0         | 159.987   | 0       | 0             | 164.749   | 0        | 0     | 0,00                | 0,47         |
| 25   | Penambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi             | 0             | 1.348     | 76.701    | 0       | 1.396         | 80.398    | 0        | 0     | 0,00                | 0,04         |
| 26   | Penambangan dan Penggalian Lainnya                 | 1.796         | 0         | 37.344    | 2.073   | 0             | 42.747    | 0        | 0     | 0,00                | 0,84         |
| 27   | Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan         | 151.471       | 0         | 266.942   | 164.874 | 0             | 180.284   | 0        | 0     | 0,00                | 0,04         |
| 28   | Industri Minyak dan Lemak                          | 46.941        | 0         | 129.490   | 51.095  | 0             | 247.830   | 0        | 0     | 0,00                | 0,04         |
| 29   | Industri Penggilingan Padi                         | 304.461       | 0         | 332.815   | 331.403 | 0             | 359.412   | 0        | 0     | 0,00                | 0,06         |
| 30   | Industri Tepung, Segala Jenis                      | 101.257       | 0         | 131.603   | 110.217 | 0             | 142.121   | 0        | 0     | 0,00                | 0,05         |
| 31   | Industri Gula                                      | 24.422        | 0         | 30.427    | 26.583  | 0             | 32.859    | 0        | 0     | 0,00                | 0,03         |
| 32   | Industri Makanan Lainnya                           | 142.412       | 0         | 208.991   | 155.014 | 0             | 225.693   | 0        | 0     | 0,00                | 0,05         |
| 33   | Industri Minuman                                   | 23.246        | 0         | 20.065    | 25.303  | 0             | 21.668    | 0        | 0     | 0,00                | 0,07         |
| 34   | Industri Rokok                                     | 158.044       | 0         | 80.497    | 172.03  | 0             | 86.930    | 0        | 0     | 0,00                | 0,08         |
| 35   | Industri Pemintalan                                | 554           | 0         | 40.555    | 615     | 0             | 44.683    | 0        | 0     | 0,00                | 0,08         |
| 36   | Industri Tekstil, Pakaian dan Kulit                | 125.451       | 248       | 233.616   | 139.318 | 270           | 257.398   | 0        | 0     | 0,00                | 0,09         |
| 37   | Industri Bambu, Kayu dan Rotan                     | 33.498        | 165       | 118.441   | 37.246  | 180           | 130.656   | 0        | 0     | 0,00                | 0,07         |
| 38   | Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Karton     | 23.008        | 0         | 119.995   | 25.278  | 0             | 130.796   | 0        | 0     | 0,00                | 0,09         |
| 39   | Industri Pupuk dan Pestisida                       | 7.691         | 0         | 46.164    | 8.248   | 0             | 49.119    | 0        | 0     | 0,00                | 0,02         |
| 40   | Industri Kimia                                     | 98.525        | 0         | 283.78    | 105.665 | 0             | 301.948   | 0        | 0     | 0,00                | 0,05         |
| 41   | Pengilangan Minyak Bumi                            | 88.059        | 0         | 182.341   | 93.079  | 0             | 191.218   | 0        | 0     | 0,00                | 0,00         |
| 42   | Industri Barang Karet dan Plastik                  | 79.541        | 0         | 235.600   | 85.305  | 0             | 250.684   | 0        | 0     | 0,00                | 0,08         |
| 43   | Industri Barang-Barang dari Mineral Bukan Logam    | 8.539         | 122       | 38.413    | 9.490   | 133           | 42.356    | 0        | 0     | 0,00                | 0,07         |
| 44   | Industri Semen                                     | 0             | 0         | 31.051    | 0       | 0             | 34.239    | 0        | 0     | 0,00                | 0,00         |
| 45   | Industri Dasar Besi dan Baja                       | 0             | 0         | 45.088    | 0       | 0             | 48.145    | 0        | 0     | 0,00                | 0,00         |
| 46   | Industri Logam Dasar Bukan Besi                    | 0             | 0         | 57.756    | 0       | 0             | 61.672    | 0        | 0     | 0,00                | 0,00         |
| 47   | Industri Barang dari Logam                         | 21.783        | 8.817     | 137.857   | 23.445  | 9.301         | 147.203   | 0        | 0     | 0,00                | 0,10         |
| 48   | Industri Mesin, Alat-Alat dan Perlengkapan Listrik | 167.942       | 178.776   | 480.414   | 192.653 | 200.997       | 546.76    | 0        | 0     | 0,00                | 0,10         |
| 49   | Industri Alat Pengangkutan dan Perbaikannya        | 140.052       | 72.516    | 214.144   | 160.658 | 81.530        | 243.717   | 0        | 0     | 0,00                | 0,10         |
| 50   | Industri Barang Lainnya                            | 16.637        | 4.324     | 25.970    | 17.206  | 4.383         | 26.647    | 0        | 0     | 0,00                | 0,08         |
| 51   | Listrik, Gas dan Air Bersih                        | 52.761        | 0         | 124.960   | 57.222  | 0             | 134.458   | 0        | 0     | 0,26                | 0,43         |
| 52   | Konstruksi   | 0             | 2.346.928 | 1.625.333 | 0       | 2.443.154     | 1.712.742 | 0        | 0     | 0,40                | 0,08         |
| 53   | Perdagangan  | 543.871       | 64.664    | 782.844   | 622.784 | 72.572        | 889.370   | 0        | 0     | 0,00                | 0,35         |
| 54   | Hotel dan Restoran                                 | 330.845       | 0         | 288.552   | 378.873 | 0             | 327.838   | 0        | 0     | 0,00                | 0,43         |
| 55   | Angkutan Kereta Api                                | 4.941         | 37        | 6.537     | 5.400   | 40            | 7.087     | 0        | 0     | 0,00                | 0,78         |
| 56   | Angkutan Darat                                     | 132.881       | 10.406    | 236.940   | 101.740 | 12.414        | 286.127   | 0        | 0     | 0,00                | 0,92         |
| 57   | Angkutan Air                                       | 23.475        | 2.199     | 67.279    | 26.911  | 2.470         | 76.520    | 0        | 0     | 0,00                | 0,88         |
| 58   | Angkutan Udara                                     | 126.340       | 663       | 154.706   | 161.783 | 832           | 196.547   | 0        | 0     | 0,00                | 0,21         |
| 59   | Jasa Penunjang Angkutan                            | 12.099        | 1.748     | 32.823    | 13.518  | 1.914         | 36.383    | 0        | 0     | 0,00                | 0,18         |
| 60   | Komunikasi   | 153.494       | 0         | 77.633    | 172.824 | 0             | 86.721    | 0        | 0     | 0,00                | 0,00         |
| 61   | Lembaga Keuangan                                   | 76.274        | 0         | 151.063   | 89.551  | 0             | 175.963   | 0        | 0     | 0,00                | 0,31         |
| 62   | Usaha Bangunan dan Jasa Perusahaan                 | 140.675       | 3.988     | 144.163   | 158.943 | 4.417         | 161.601   | 0        | 0     | 0,00                | 0,07         |
| 63   | Pemerintahan Umum dan Pertahanan                   | 22.826        | 0         | 223.720   | 25.598  | 0             | 248.914   | 0        | 0     | 0,00                | 0,68         |
| 64   | Jasa Sosial Kemasyarakatan                         | 216.688       | 0         | 254.549   | 216.688 | 0             | 334.350   | 0        | 0     | 0,00                | 0,57         |
| 65   | Jasa Lainnya                                       | 187.741       | 32.723    | 270.910   | 213.112 | 36.406        | 305.097   | 0        | 0     | 0,00                | 0,53         |
| 66   | Kegiatan yang Tak Jelas Batasannya                 | 4.039         | 0         | 2.914     | 4.371   | 0             | 3.129     | 0        | 0     | 1,00                | 0,20         |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis



**Tabel 17:** Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2012 (Miliar Rupiah)

| No    | Lapangan Usaha                                   | Total Penge-<br>luaran | Basis PPN | Proyeksi Pene-<br>rimaan PPN | Basis PPnBM | Proyeksi Pene-<br>rimaan PPnBM | Proyeksi Pene-<br>rimaan PPN &<br>PPnBM |
|-------|--|------------------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| (1)   | (2)  | (3)                    | (4)       | (5)                          | (6)         | (7)                            | (8)                                     |
| 1     | Konsumsi Akhir Rumah Tangga                      | 4.496.373              | 2.127.210 | 212.721                      | 292.724     | 21.626                         | 234.347                                 |
| 2     | Pengeluaran Usaha (PMTB dan <i>Input</i> Antara) | 11.580.616             | 3.737.249 | 373.725                      | 0           | 0                              | 373.725                                 |
| 3     | Pengeluaran Pemerintah                           | 557.164                | 281.992   | 28.199                       | 0           | 0                              | 28.199                                  |
| TOTAL |  | 16.634.153             | 6.146.450 | 614.645                      | 292.724     | 21.626                         | 636.271                                 |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

**Tabel 18:** Proyeksi Penerimaan PPN dan PPnBM dan Tingkat Kepatuhan PPN dan PPnBM Tahun 2012

| No    | Lapangan Usaha                                 | Proyeksi Pene-<br>rimaan PPN | Realisasi Pene-<br>rimaan PPN | Estimasi Tingkat Kepa-<br>tuhan PPN | Proyeksi Pene-<br>rimaan PP-<br>nBM | Realisasi Pene-<br>rimaan PP-<br>nBM | Estimasi Tingkat Kepa-<br>tuhan PP-<br>nBM |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| (1)   | (2)  | (3)                          | (4)                           | (5)-                                | (6)                                 | (7)                                  | (8)  |
| 1     | Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 186                          |                               |                                     | -                                   |                                      | 0%   |
| 2     | Pertambangan Minyak dan Gas                    | 4                            |                               |                                     | -                                   |                                      | 0%   |
| 3     | Pertambangan Bukan Gas                         | -                            |                               |                                     | -                                   |                                      | 0%   |
| 4     | Penggalian                                     | -                            |                               |                                     | -                                   |                                      | 0%   |
| 5     | Industri Pengolahan                            | 270.010                      | 159.095                       | 59%                                 | 16.405                              | 14.698                               | 90%  |
| 6     | Listrik, Gas dan Air Bersih                    | 2.789                        | 1.212                         | 43%                                 | -                                   |                                      | 0%   |
| 7     | Konstruksi                                     | 162.973                      | 25.944                        | 16%                                 | -                                   |                                      | 0%   |
| 8     | Perdagangan, Hotel dan Restoran                | 64.614                       | 67.279                        | 104%                                | 5.221                               | 4.899                                | 94%  |
| 9     | Pengangkutan dan Komunikasi                    | 33.497                       | 20.491                        | 61%                                 | -                                   |                                      | 0%   |
| 10    | Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan      | 26.973                       | 10.258                        | 38%                                 | -                                   |                                      | 0%   |
| 11    | Jasa-Jasa dan Lainnya                          | 53.599                       | 33.698                        | 63%                                 | -                                   |                                      | 0%   |
| TOTAL |  | 614.645                      | 317.977                       | 52%                                 | 21.626                              | 19.597                               | 91%  |

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 19: Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2013 (Miliar Rupiah) - Bagian 1

| No                          | Lapangan Usaha | Kena Pajak |      | Proporsi PKP dibayar oleh pembayar | Kena Pajak Efektif | Basis PPN | Tarif PPN/BM | Project- ed PPN-100% Comply | Faktor Koef- versinya Sup- plier | Project- ed PPN-100% Comply- Adjusted | Tingkat Kepatuhan (BASE) |     | Project- ed PPN-100% Comply | Basis PPN- BM | Project- ed PPN-100% Comply |        | PPN BM  |     |
|-----------------------------|----------------|------------|------|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------|---------|-----|
|                             |                | (4A)       | (4B) |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       | (4C)                     | (4) |                             |               | (5)*(6)                     | (8)    |         | (9) |
| (1)                         | (2)            | (3)        | (3)  | (3)                                | (3)                | (3)       | (3)          | (3)                         | (3)                              | (3)                                   | (3)                      | (3) | (3)                         | (3)           | (3)                         | (3)    | (3)     | (3) |
| TOTAL                       |                | 18.412.381 |      | <600M                              |                    | 6.897.115 | 10%          | 689.712                     | N/A                              | 689.712                               | 0%                       | 0%  | 360.216                     | 335.705       | 24.797                      | 20.677 | 380.593 |     |
| 1                           | Consumer       | 5.071.094  |      |                                    |                    | 238.403   |              | 238.403                     | N/A                              | 238.403                               |                          | 0%  | 142.388                     | 335.705       | 24.797                      | 20.677 | 163.065 |     |
| 2                           | Business       | 12.622.995 |      |                                    |                    | 4.037.237 |              | 403.724                     | 232.172                          | 403.724                               |                          | 59% | 172.622                     |               |                             |        | 172.622 |     |
| 3                           | Government     | 718.293    |      |                                    |                    | 475.853   |              | 47.585                      | N/A                              | 47.585                                |                          |     | 45.206                      |               |                             |        | 45.206  |     |
| KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA |                |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 1                           | Padi           | 0          | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 2                           | Tanaman        | 13.037     | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 3                           | Kacang         | 61.368     | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 4                           | Jagung         | 30.682     | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 5                           | Umbi-Umbi-     |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 5                           | an             | 216.142    | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 6                           | Sayur-Sayur-   |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 6                           | tan            | 1.122      | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 7                           | Bahan Ma-      |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 7                           | kanan          |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 7                           | Lainnya        | 0          | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 8                           | Karet          | 90         | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 9                           | Lainnya        | 11.118     | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 10                          | Kelapa Sawit   | 0          | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 11                          | Tembakau       | 1.021      | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 12                          | Kopi           | 929        | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 13                          | Teh            | 190        | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 14                          | Cengkeh        | 3          | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 15                          | Hasil Tanam-   | 0          | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 16                          | an             | 1.725      | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 17                          | Perkebunan     |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 17                          | Lainnya        | 3.565      | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 18                          | Lainnya        | 89.099     | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 19                          | Peternakan     | 89.530     | 0,00 | 0,14                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 59%                      | 59% | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 20                          | Hewan          |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 20                          | Unggas dan     | 105.733    | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 21                          | Hasil-Hasil-   |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 21                          | nya            | 2.464      | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 22                          | Kayu           | 3.954      | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 23                          | Hasil Hutan    |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 23                          | Lainnya        | 205.051    | 0,00 | 0,88                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 24                          | Perikanan      |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 24                          | Penambangan    | 0          | 0,00 | 0,20                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 25                          | Batubara dan   |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 25                          | Bijih Logam    | 0          | 0,00 | 0,00                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 25                          | Penambangan    |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 25                          | Minyak, Gas,   |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 25                          | dan Panas      |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 26                          | Bumi           | 2.073      | 0,00 | 0,12                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 0%                       | 0%  | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 27                          | Penamban-      |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 27                          | gan dan Peng-  | 164.874    | 1,00 | 0,14                               | 0,86               | 141.715   | 10%          | 14.171                      | N/A                              | 14.171                                | 59%                      | 59% | 8.361                       | 0             | 0                           | 0      | 8.361   |     |
| 28                          | gangan         |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 28                          | Lainnya        | 51.095     | 1,00 | 0,14                               | 0,86               | 43.918    | 10%          | 4.392                       | N/A                              | 4.392                                 | 59%                      | 59% | 2.591                       | 0             | 0                           | 0      | 2.591   |     |
| 29                          | Industri       |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 29                          | Minyak dan     | 331.403    | 0,00 | 0,14                               | 0,00               | 0         | 0%           | 0                           | N/A                              | 0                                     | 59%                      | 59% | 0                           | 0             | 0                           | 0      | 0       |     |
| 30                          | Lebak          |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 30                          | Industri       | 110.217    | 1,00 | 0,14                               | 0,86               | 94.735    | 10%          | 9.473                       | N/A                              | 9.473                                 | 59%                      | 59% | 5.589                       | 0             | 0                           | 0      | 5.589   |     |
| 31                          | Padi           |            |      |                                    |                    |           |              |                             |                                  |                                       |                          |     |                             |               |                             |        |         |     |
| 31                          | Industri       | 26.583     | 1,00 | 0,14                               | 0,86               | 22.849    | 10%          | 2.285                       | N/A                              | 2.285                                 | 59%                      | 59% | 1.348                       | 0             | 0                           | 0      | 1.348   |     |

bersambung...

Tabel 20: Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2013 (Miliar Rupiah) - Bagian 2

| No | Lapangan Usaha  | Total Pengeluaran (Miliar) | Kewaajiban Pajak |      | Kewaajiban Pajak Efektif | Proporsi di bawah threshold | Proporsi PPN-100% Comply |      | Tarif PPN/BM | Basis PPN | Faktor Konversi Suppler | Proporsi PPN-100% Comply Adjusted Compliance | Tingkat Kepatuhan (BASE) | Tingkat Kepatuhan (Adjusted) | Project-nerimaan PPN | Project-nerimaan PPN | Basis PPN-BM | Project-nerimaan PPN-100% Comply |     | PPN dan PPN-BM |
|----|---|----------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------|-----------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-----|----------------|
|    |   |                            | (4A)             | (4B) |                          |                             | (4C)                     | (4D) |              |           |                         |  |                          |                              |                      |                      |              | (5)*                             | (6) |                |
| 32 | Industri Makanan Lainnya  | 155.014                    | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 13.324                   | N/A  | 10%          | 133.239   | N/A                     | 13.324                                       | 59%                      | 59%                          | 7.861                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 7.861          |
| 33 | Industri Minuman  | 25.303                     | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 2.175                    | N/A  | 10%          | 21.749    | N/A                     | 2.175  | 59%                      | 59%                          | 1.283                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 1.283          |
| 34 | Industri Rokok  | 172.030                    | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 14.787                   | N/A  | 10%          | 147.865   | N/A                     | 14.787                                       | 59%                      | 59%                          | 8.724                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 8.724          |
| 35 | Industri Kimia  | 615                        | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 53                       | N/A  | 10%          | 529       | N/A                     | 53   | 59%                      | 59%                          | 31                   | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 31             |
| 36 | Pemintakan, Tekstil, Pakaiannya dan Kulit                           | 139.318                    | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 11.975                   | N/A  | 10%          | 119.749   | N/A                     | 11.975                                       | 59%                      | 59%                          | 7.065                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 7.065          |
| 37 | Industri Bumbu, Kayu dan Rotan                                      | 37.246                     | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 3.201                    | N/A  | 10%          | 32.014    | N/A                     | 3.201  | 59%                      | 59%                          | 1.889                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 1.889          |
| 38 | Industri Kertas, Bungkusan, Kertas dan Karton                       | 25.278                     | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 2.173                    | N/A  | 10%          | 21.727    | N/A                     | 2.173  | 59%                      | 59%                          | 1.282                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 1.282          |
| 39 | Industri Pupuk dan Pestisida  | 8.248                      | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 709                      | N/A  | 10%          | 7.089     | N/A                     | 709  | 59%                      | 59%                          | 418                  | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 418            |
| 40 | Industri Kimia  | 105.665                    | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 9.082                    | N/A  | 10%          | 90.822    | N/A                     | 9.082  | 59%                      | 59%                          | 5.359                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 5.359          |
| 41 | Industri Logam  | 93.079                     | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 8                        | N/A  | 10%          | 80.004    | N/A                     | 8  | 59%                      | 59%                          | 4.720                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 4.720          |
| 42 | Industri Barang Karet dan Plastik                                   | 85.305                     | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 7.332                    | N/A  | 10%          | 73.323    | N/A                     | 7.332  | 59%                      | 59%                          | 4.326                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 4.326          |
| 43 | Industri Barang-Barang dari Mineral                                 | 9.490                      | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 816                      | N/A  | 10%          | 8.157     | N/A                     | 816  | 59%                      | 59%                          | 481                  | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 481            |
| 44 | Industri Semen  | 0                          | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 0                        | N/A  | 10%          | 0         | N/A                     | 0  | 59%                      | 59%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
| 45 | Industri Dasar Besi dan Baja  | 0                          | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 0                        | N/A  | 10%          | 0         | N/A                     | 0  | 59%                      | 59%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
| 46 | Industri Logam Dasar Bukan Besi                                     | 23.445                     | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 2.015                    | N/A  | 10%          | 20.151    | N/A                     | 2.015  | 59%                      | 59%                          | 1.189                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 1.189          |
| 47 | Industri Barang Industri Mesin, Alat-Alat dan Perleengkapan Listrik | 192.653                    | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 16.559                   | N/A  | 10%          | 165.591   | N/A                     | 16.559                                       | 59%                      | 59%                          | 9.770                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 9.770          |
| 48 | Sales Tax** @0%   | 0,33                       | N/A              |      | 0,33                     |                             |                          | N/A  | 0%           | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 62.612               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @10%  | 0,20                       | N/A              |      | 0,20                     |                             |                          | N/A  | 10%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 27.507               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @20%  | 0,15                       | N/A              |      | 0,15                     |                             |                          | N/A  | 20%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 25.046               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @30%  | 0,10                       | N/A              |      | 0,10                     |                             |                          | N/A  | 30%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @40%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 40%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @50%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 50%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @60%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 60%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @75%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 75%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @75%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 75%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
| 49 | Industri Alat Pengangkutan dan Lain-lainnya                         | 160.658                    | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 13.809                   | N/A  | 10%          | 138.091   | N/A                     | 13.809                                       | 59%                      | 59%                          | 8.147                | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 8.147          |
|    | Sales Tax** @0%   | 0,65                       | N/A              |      | 0,65                     |                             |                          | N/A  | 0%           | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 103.694              | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @10%  | 0,21                       | N/A              |      | 0,21                     |                             |                          | N/A  | 10%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 34.168               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @20%  | 0,09                       | N/A              |      | 0,09                     |                             |                          | N/A  | 20%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 15.206               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @30%  | 0,01                       | N/A              |      | 0,01                     |                             |                          | N/A  | 30%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 3.041                | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @40%  | 0,02                       | N/A              |      | 0,02                     |                             |                          | N/A  | 40%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 1.349                | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @50%  | 0,01                       | N/A              |      | 0,01                     |                             |                          | N/A  | 50%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 3.265                | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @60%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 60%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 960                  | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @75%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 75%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 34.168               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @75%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 75%          | N/A       | N/A                     | 0  | 82%                      | 82%                          | 0                    | 1.306                | 0            | 0                                | 0   | 0              |
| 50 | Industri Barang Lain-lainnya  | 17.206                     | 1,00             | 0,14 | 0,86                     |                             | 1.479                    | N/A  | 10%          | 14.789    | N/A                     | 1.479  | 59%                      | 59%                          | 873                  | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 873            |
| 51 | Listrik, Gas dan Air Bersih   | 57.222                     | 0,26             | 0,01 | 0,26                     |                             | 1.488                    | N/A  | 10%          | 14.878    | N/A                     | 1.488  | 55%                      | 55%                          | 818                  | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 818            |
| 52 | Konstruksi  | 0                          | 0,00             | 0,12 | 0,00                     |                             | 0                        | N/A  | 10%          | 0         | N/A                     | 0  | 21%                      | 21%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
| 53 | Perdagangan   | 622.754                    | 1,00             | 0,29 | 0,71                     |                             | 44                       | N/A  | 10%          | 440.001   | N/A                     | 44   | 74%                      | 74%                          | 32.560               | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 32.560         |
|    | Sales Tax** @0%   | 0,01                       | N/A              |      | 0,01                     |                             |                          | N/A  | 0%           | N/A       | N/A                     | 0  | 86%                      | 86%                          | 0                    | 4.989                | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @10%  | 0,02                       | N/A              |      | 0,02                     |                             |                          | N/A  | 10%          | N/A       | N/A                     | 0  | 86%                      | 86%                          | 0                    | 29.894               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @20%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 20%          | N/A       | N/A                     | 0  | 86%                      | 86%                          | 0                    | 14.947               | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @30%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 30%          | N/A       | N/A                     | 0  | 86%                      | 86%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @40%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 40%          | N/A       | N/A                     | 0  | 86%                      | 86%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |
|    | Sales Tax** @50%  | 0,00                       | N/A              |      | 0,00                     |                             |                          | N/A  | 50%          | N/A       | N/A                     | 0  | 86%                      | 86%                          | 0                    | 0                    | 0            | 0                                | 0   | 0              |

bersambung...

Tabel 21: Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2013 (Miliar Rupiah) - Bagian 3

| No                     | Lapangan Usaha                          | Total Penge-luaran (Miliar) | Proporsi        |                             |                         |                | Tingkat Kepatuhan (Adjusted) |                      |  |                            | Projected Penerimaan                              |      |                  |  |  |                                    |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|------|------------------|--|--|------------------------------------|
|                        |   |                             | Kena Pajak (4A) | PKP di bawah threshold (4B) | Kena Pajak Efektif (4C) | (5) = (3)/(4A) | Basis PPN (5) = (3)/(4C)     | Tarif PPN/PPn-BM (6) | Projected Penerimaan 100% Comply (7) = (5)*(6) | Faktor versi Sup-plier (8) | Projected Penerimaan 100% Adjusted-Compliance (9) | (10) | (11) = (9)*(10A) | Projected Penerimaan 100% Comply (12) = (11)*(10A) | Projected Penerimaan 100% Comply (13) = (12)*(10A) | PPn-BM dan PPN-BM (14) = (13)+(14) |
| 54                     | Sales Tax** @75%<br>Hotel dan Restoran  | 378.873                     | 0,00            | N/A                         | 0,00                    | N/A            | 60                           | N/A                  | 0  | 86%                        | 0   | 86%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 55                     | Angkutan Darat dan Kereta Api           | 5.400                       | 0,00            | 0,00                        | 0,00                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 59%                        | 0   | 59%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 56                     | Angkutan Darat                          | 161.740                     | 0,00            | 0,21                        | 0,00                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 59%                        | 0   | 59%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 57                     | Angkutan Air                            | 26.911                      | 0,00            | 0,21                        | 0,00                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 59%                        | 0   | 59%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 58                     | Angkutan Udara                          | 161.783                     | 0,75            | 0,00                        | 0,75                    | 121.338        | 10%                          | 12.134               | 12.134   | 59%                        | 10%   | 59%  | 7.159            | 0  | 0  | 7.159                              |
| 59                     | Jasa Penunjang                          | 13.518                      | 1,00            | 0,21                        | 0,79                    | 10.645         | 10%                          | 1.064                | 1.064  | 59%                        | 10%   | 59%  | 628              | 0  | 0  | 628                                |
| 60                     | Angkutan                                | 172.824                     | 1,00            | 0,21                        | 0,79                    | 136.089        | 10%                          | 13.609               | 13.609   | 59%                        | 10%   | 59%  | 8.029            | 0  | 0  | 8.029                              |
| 61                     | Lembaga Keuangan                        | 89.551                      | 0,00            | 0,13                        | 0,00                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 42%                        | 0   | 42%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 62                     | Usaha Real Estat dan Jasa               | 158.943                     | 1,00            | 0,13                        | 0,87                    | 138.047        | 10%                          | 13.805               | 13.805   | 42%                        | 10%   | 42%  | 5.798            | 0  | 0  | 5.798                              |
| 63                     | Perusahaan Umum/Perusahaan Pertambangan | 25.598                      | 0,00            | 0,33                        | 0,00                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 42%                        | 0   | 42%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 64                     | Jasa Sosial                             | 254.842                     | 0,00            | 0,33                        | 0,00                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 42%                        | 0   | 42%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 65                     | Komasyarakatan                          | 213.112                     | 1,00            | 0,33                        | 0,67                    | 142.009        | 10%                          | 14.201               | 14.201   | 42%                        | 10%   | 42%  | 5.964            | 0  | 0  | 5.964                              |
| 66                     | Jasa Lainnya                            | 4.371                       | 1,00            | 0,33                        | 0,67                    | 2.912          | 10%                          | 291                  | 291  | 42%                        | 10%   | 42%  | 122              | 0  | 0  | 122                                |
| PENGELUARAN USAHA PMTB |   |                             |                 |                             |                         |                |                              |                      |  |                            |   |      |                  |  |  |                                    |
| 1                      | Padi                                    | 0                           | 0,43            | N/A                         | 0,43                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 0   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 2                      | Tanaman                                 | 0                           | 0,37            | N/A                         | 0,37                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 0   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 3                      | Kacang-Kacangan                         | 0                           | 0,36            | N/A                         | 0,36                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 0   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 4                      | Tanaman Umbi-Lainnya                    | 0                           | 0,28            | N/A                         | 0,28                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 0   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 5                      | Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan           | 9                           | 0,41            | N/A                         | 0,41                    | 4              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 0   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 6                      | Tanaman Lainnya                         | 0                           | 0,71            | N/A                         | 0,71                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 0   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 7                      | Karet                                   | 350                         | 0,47            | N/A                         | 0,47                    | 166            | 10%                          | 17                   | 17   | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 8                      | Kayu                                    | 0                           | 0,57            | N/A                         | 0,57                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 9                      | Kelapa                                  | 399                         | 0,51            | N/A                         | 0,51                    | 228            | 10%                          | 23                   | 23   | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 10                     | Kelapa Sawit                            | 1.129                       | 0,51            | N/A                         | 0,51                    | 577            | 10%                          | 58                   | 58   | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 11                     | Tembakau                                | 0                           | 0,68            | N/A                         | 0,68                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 12                     | Kopi                                    | 311                         | 0,55            | N/A                         | 0,55                    | 171            | 10%                          | 17                   | 17   | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 13                     | Teh                                     | 20                          | 0,68            | N/A                         | 0,68                    | 14             | 10%                          | 1                    | 1  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 14                     | Cengkeh                                 | 69                          | 0,71            | N/A                         | 0,71                    | 49             | 10%                          | 5                    | 5  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 15                     | Hasil Tanaman Perak                     | 0                           | 0,64            | N/A                         | 0,64                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 16                     | Perkebunan Lainnya                      | 104                         | 0,63            | N/A                         | 0,63                    | 65             | 10%                          | 7                    | 7  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 17                     | Tanaman                                 | 0                           | 0,40            | N/A                         | 0,40                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 18                     | Lainnya                                 | 1.455                       | 0,53            | N/A                         | 0,53                    | 767            | 10%                          | 77                   | 77   | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 19                     | Peternakan                              | 0                           | 0,09            | N/A                         | 0,09                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 59%                        | 10%   | 59%  | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 20                     | Perikanan                               | 0                           | 0,75            | N/A                         | 0,75                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 21                     | Unggas dan Hasil-Hasilnya               | 0                           | 0,47            | N/A                         | 0,47                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 22                     | Hasil Hutan                             | 0                           | 0,51            | N/A                         | 0,51                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 23                     | Lainnya                                 | 0                           | 0,42            | N/A                         | 0,42                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 24                     | Perikanan Bawahair dan Budidaya         | 0                           | 0,37            | N/A                         | 0,37                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 25                     | Bijih Logam                             | 1.396                       | 0,03            | N/A                         | 0,03                    | 43             | 10%                          | 4                    | 4  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
| 26                     | Penambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi  | 0                           | 0,61            | N/A                         | 0,61                    | 0              | 10%                          | 0                    | 0  | 0%                         | 10%   | 0%   | 0                | 0  | 0  | 0                                  |
|                        | Penambangan dan Kegiatan Lainnya        |                             |                 |                             |                         |                |                              |                      |  |                            |   |      |                  |  |  |                                    |

bersambung...

Tabel 22: Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2013 (Miliar Rupiah) - Bagian 4

| No | Lapangan Usaha  | Total Pengeluaran (Miliar) (3) | Proporsi |      | Kena Pajak (4A) | (4B) | (4C)      | Basis PPN (5) = (3) * (4C) | Tarif PPN/PPn-BM (6) | Project-ed PPN-100% Comply (Miliar) (7) = (5) * (6) | Faktor Konversi Supplier (8) | Project-ed PPN-100% Comply Adjusted (Miliar) (9) | Tingkat Kepatuhan (BASE) (Adjusted) |       | Project-ed PPN-100% Comply (Miliar) (11) = (9) * (10A) | Basis PPN-BM (12) | Projected Penerimaan |                   |                     |                    |
|----|---|--------------------------------|----------|------|-----------------|------|-----------|----------------------------|----------------------|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|    |   |                                | (4A)     | (4B) |                 |      |           |                            |                      |   |                              |  | (10)                                | (10A) |  |                   | (12)                 | (13) = (12) * (6) | (14) = (13) * (10A) | (15) = (11) + (14) |
| 27 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan              | 0                              | 0,04     | N/A  | 0,04            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 28 | Industri Minyak   | 0                              | 0,05     | N/A  | 0,05            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 29 | Industri Penggilingan Padi                              | 0                              | 0,04     | N/A  | 0,04            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 30 | Industri Tepung, Segala Jenis                           | 0                              | 0,06     | N/A  | 0,06            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 31 | Industri Gula   | 0                              | 0,03     | N/A  | 0,03            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 32 | Industri Makanan  | 0                              | 0,05     | N/A  | 0,05            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 33 | Industri Minuman  | 0                              | 0,07     | N/A  | 0,07            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 34 | Industri Rokok  | 0                              | 0,08     | N/A  | 0,08            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 35 | Industri  | 0                              | 0,08     | N/A  | 0,08            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 36 | Pemintalan Industri Tekstil, Kain dan Kainan dan Kainan | 270                            | 0,09     | N/A  | 0,09            | N/A  | 26        | 26                         | 10%                  | 3   | N/A                          | 3  | 59%                                 | 59%   | 2  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 2                  |
| 37 | Industri Barbu, Kayu dan Rotan                          | 180                            | 0,08     | N/A  | 0,08            | N/A  | 14        | 14                         | 10%                  | 1   | N/A                          | 1  | 59%                                 | 59%   | 1  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 1                  |
| 38 | Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Karton          | 0                              | 0,10     | N/A  | 0,10            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 39 | Karton, Pupuk dan Pestisida                             | 0                              | 0,03     | N/A  | 0,03            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 40 | Industri Kimia  | 0                              | 0,05     | N/A  | 0,05            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 41 | Pengilangan Minyak Bumi                                 | 0                              | 0,01     | N/A  | 0,01            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 42 | Industri Barang Keras dan Plastik                       | 0                              | 0,08     | N/A  | 0,08            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 43 | Industri Barang dari Mineral Bukan Logam                | 133                            | 0,07     | N/A  | 0,07            | N/A  | 10        | 10                         | 10%                  | 1   | N/A                          | 1  | 59%                                 | 59%   | 1  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 1                  |
| 44 | Industri Semen  | 0                              | 0,02     | N/A  | 0,02            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 45 | Industri Dasar Besi dan Baja                            | 0                              | 0,07     | N/A  | 0,07            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 46 | Industri Logam Dasar, Baku, Besi dari Logam             | 0                              | 0,01     | N/A  | 0,01            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 47 | Industri Barang dari Logam                              | 9.301                          | 0,10     | N/A  | 0,10            | N/A  | 952       | 952                        | 10%                  | 95  | N/A                          | 95   | 59%                                 | 59%   | 56   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 56                 |
| 48 | Industri Mesin, Alat-Alat dan Perlengkapan              | 200.997                        | 0,11     | N/A  | 0,11            | N/A  | 22.045    | 22.045                     | 10%                  | 2.205   | N/A                          | 2.205  | 59%                                 | 59%   | 1.301  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 1.301              |
| 49 | Industri Alat Pengangkutan dan Perbaikannya             | 81.530                         | 0,11     | N/A  | 0,11            | N/A  | 9.014     | 9.014                      | 10%                  | 901   | N/A                          | 901  | 59%                                 | 59%   | 532  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 532                |
| 50 | Industri Barang Lainnya                                 | 4.383                          | 0,09     | N/A  | 0,09            | N/A  | 379       | 379                        | 10%                  | 38  | N/A                          | 38   | 59%                                 | 59%   | 22   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 22                 |
| 51 | Lainnya Listrik, Gas                                    | 0                              | 0,36     | N/A  | 0,36            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 55%                                 | 55%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 52 | Konstruksi  | 2.443.154                      | 0,68     | N/A  | 0,68            | N/A  | 1.649.129 | 1.649.129                  | 10%                  | 164.913   | N/A                          | 164.913  | 21%                                 | 21%   | 34.632   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 34.632             |
| 53 | Perdagangan Hotel dan Restoran                          | 72.572                         | 0,15     | N/A  | 0,15            | N/A  | 11.243    | 11.243                     | 10%                  | 1.124   | N/A                          | 1.124  | 74%                                 | 74%   | 832  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 832                |
| 54 | Perdagangan   | 0                              | 0,33     | N/A  | 0,33            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 74%                                 | 74%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 55 | Angkutan Kereta Api                                     | 40                             | 0,60     | N/A  | 0,60            | N/A  | 24        | 24                         | 10%                  | 2   | N/A                          | 2  | 59%                                 | 59%   | 1  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 1                  |
| 56 | Angkutan Darat  | 12.414                         | 0,71     | N/A  | 0,71            | N/A  | 8.853     | 8.853                      | 10%                  | 885   | N/A                          | 885  | 59%                                 | 59%   | 522  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 522                |
| 57 | Angkutan Udara  | 2.470                          | 0,73     | N/A  | 0,73            | N/A  | 1.795     | 1.795                      | 10%                  | 179   | N/A                          | 179  | 59%                                 | 59%   | 106  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 106                |
| 58 | Angkutan Jasa, Penunjang                                | 832                            | 0,18     | N/A  | 0,18            | N/A  | 151       | 151                        | 10%                  | 15  | N/A                          | 15   | 59%                                 | 59%   | 9  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 9                  |
| 59 | Angkutan Komunikasi                                     | 1.914                          | 0,13     | N/A  | 0,13            | N/A  | 244       | 244                        | 10%                  | 24  | N/A                          | 24   | 59%                                 | 59%   | 14   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 14                 |
| 60 | Keuangan  | 0                              | 0,13     | N/A  | 0,13            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 59%                                 | 59%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 61 | Keuangan Real Estat dan Jasa                            | 0                              | 0,25     | N/A  | 0,25            | N/A  | 0         | 0                          | 10%                  | 0   | N/A                          | 0  | 42%                                 | 42%   | 0  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 0                  |
| 62 | Perusahaan  | 4.417                          | 0,07     | N/A  | 0,07            | N/A  | 301       | 301                        | 10%                  | 30  | N/A                          | 30   | 42%                                 | 42%   | 13   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                   | 13                 |

bersambung...



Tabel 24: Potensi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2013 (Miliar Rupiah) - Bagian 6

| No  | Lapangan Usaha                              | Proporsi |          |          |          | Tingkat Kepatuhan (Adjusted) |          |          |          | Projected Penerimaan |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |   | (4A)     | (4B)     | (4C)     | (4D)     | (5)                          | (6)      | (7)      | (8)      | (9)                  | (10)     | (10A)    | (11)     | (12)     | (13)     | (14)     | (15)     |
| (1) | (2)   | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar)                     | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar)             | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) | (Miliar) |
| 39  | Industri Pupuk dan Pesisir                  | 0,03     | N/A      | 0,03     | 1.289    | 10%                          | 129      | 4,12%    | 9.567    | 59%                  | 59%      | 5.644    | 0        | 0        | 0        | 5.644    | 0        |
| 40  | Industri Kimia                              | 0,05     | N/A      | 0,05     | 16.260   | 10%                          | 1.626    | 5,93%    | 13.768   | 59%                  | 59%      | 8.123    | 0        | 0        | 0        | 8.123    | 0        |
| 41  | Minyak Bumi                                 | 0,01     | N/A      | 0,01     | 1.221    | 10%                          | 122      | 14,13%   | 32.800   | 59%                  | 59%      | 19.352   | 0        | 0        | 0        | 19.352   | 0        |
| 42  | Industri Barang Karet dan Plastik           | 0,08     | N/A      | 0,08     | 21.127   | 10%                          | 2.113    | 2,78%    | 6.445    | 59%                  | 59%      | 3.802    | 0        | 0        | 0        | 3.802    | 0        |
| 43  | Industri Barang-Barang dari Mineral         | 0,07     | N/A      | 0,07     | 3.153    | 10%                          | 315      | 1,70%    | 3.939    | 59%                  | 59%      | 2.324    | 0        | 0        | 0        | 2.324    | 0        |
| 44  | Bahan Baku Industri Seng                    | 0,02     | N/A      | 0,02     | 753      | 10%                          | 75       | 1,53%    | 3.545    | 59%                  | 59%      | 2.092    | 0        | 0        | 0        | 2.092    | 0        |
| 45  | Industri Dasar Besi dan Baja                | 0,07     | N/A      | 0,07     | 3.321    | 10%                          | 332      | 3,23%    | 7.510    | 59%                  | 59%      | 4.431    | 0        | 0        | 0        | 4.431    | 0        |
| 46  | Industri Logam Dasar Bukan Besi             | 0,01     | N/A      | 0,01     | 910      | 10%                          | 91       | 0,45%    | 1.043    | 59%                  | 59%      | 615      | 0        | 0        | 0        | 615      | 0        |
| 47  | Industri Barang dari Logam                  | 0,10     | N/A      | 0,10     | 15.063   | 10%                          | 1.506    | 7,66%    | 17.784   | 59%                  | 59%      | 10.493   | 0        | 0        | 0        | 10.493   | 0        |
| 48  | Alat-Alat dan Perlengkapan Listrik          | 0,11     | N/A      | 0,11     | 59.968   | 10%                          | 5.997    | 6,21%    | 14.413   | 59%                  | 59%      | 8.504    | 0        | 0        | 0        | 8.504    | 0        |
| 49  | Industri Alat Pengangkutan dan Lainnya      | 0,11     | N/A      | 0,11     | 26.947   | 10%                          | 2.695    | 2,96%    | 6.883    | 59%                  | 59%      | 4.061    | 0        | 0        | 0        | 4.061    | 0        |
| 50  | Industri Barang Listrik, Gas dan Air Bersih | 0,36     | N/A      | 0,36     | 2.302    | 10%                          | 230      | 0,43%    | 991      | 59%                  | 59%      | 585      | 0        | 0        | 0        | 585      | 0        |
| 51  | Konstruksi                                  | 0,37     | N/A      | 0,37     | 48.042   | 10%                          | 4.804    | 0,68%    | 1.571    | 55%                  | 55%      | 864      | 0        | 0        | 0        | 864      | 0        |
| 52  | Perdagangan Ritel dan Perhotelan            | 0,15     | N/A      | 0,15     | 686.992  | 10%                          | 63.699   | 2,18%    | 5.050    | 21%                  | 21%      | 1.061    | 0        | 0        | 0        | 1.061    | 0        |
| 53  | Angkutan                                    | 0,33     | N/A      | 0,33     | 137.779  | 10%                          | 13.778   | 12,03%   | 27.923   | 74%                  | 74%      | 20.663   | 0        | 0        | 0        | 20.663   | 0        |
| 54  | Angkutan Kereta Api                         | 0,60     | N/A      | 0,60     | 109.334  | 10%                          | 10.933   | 0,00%    | 0        | 59%                  | 59%      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 55  | Angkutan Darat                              | 0,71     | N/A      | 0,71     | 4.286    | 10%                          | 429      | 0,00%    | 0        | 59%                  | 59%      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 56  | Angkutan Air                                | 0,73     | N/A      | 0,73     | 204.056  | 10%                          | 20.406   | 0,00%    | 0        | 59%                  | 59%      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 57  | Angkutan Udara                              | 0,18     | N/A      | 0,18     | 55.603   | 10%                          | 5.560    | 0,00%    | 0        | 59%                  | 59%      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 58  | Jasa Penunjang Komunikasi                   | 0,13     | N/A      | 0,13     | 35.670   | 10%                          | 3.567    | 1,15%    | 2.665    | 59%                  | 59%      | 1.572    | 0        | 0        | 0        | 1.572    | 0        |
| 59  | Komunikasi                                  | 0,13     | N/A      | 0,13     | 4.640    | 10%                          | 464      | 1,42%    | 3.290    | 59%                  | 59%      | 1.941    | 0        | 0        | 0        | 1.941    | 0        |
| 60  | Lembaga Keuangan dan Jasa                   | 0,25     | N/A      | 0,25     | 11.048   | 10%                          | 1.105    | 2,23%    | 5.179    | 59%                  | 59%      | 3.056    | 0        | 0        | 0        | 3.056    | 0        |
| 61  | Perusahaan Perdagangan                      | 0,07     | N/A      | 0,07     | 43.745   | 10%                          | 4.375    | 0,00%    | 0        | 42%                  | 42%      | 6.858    | 0        | 0        | 0        | 6.858    | 0        |
| 62  | Perusahaan Perdagangan                      | 0,51     | N/A      | 0,51     | 11.025   | 10%                          | 1.103    | 7,03%    | 16.328   | 42%                  | 42%      | 0        | 0        | 0        | 0        | 6.858    | 0        |
| 63  | Perusahaan Perdagangan                      | 0,51     | N/A      | 0,51     | 126.178  | 10%                          | 12.618   | 0,00%    | 0        | 42%                  | 42%      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 64  | Jasa Sosial                                 | 0,46     | N/A      | 0,46     | 153.837  | 10%                          | 15.384   | 0,00%    | 0        | 42%                  | 42%      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 65  | Jasa Lainnya                                | 0,25     | N/A      | 0,25     | 77.568   | 10%                          | 7.757    | 5,62%    | 13.040   | 42%                  | 42%      | 5.477    | 0        | 0        | 0        | 5.477    | 0        |
| 66  | Kegiatan yang Tak Bisa Dibebaskan           | 0,17     | N/A      | 0,17     | 536      | 10%                          | 54       | 0,01%    | 29       | 42%                  | 42%      | 12       | 0        | 0        | 0        | 12       | 0        |

PENCIPTAAN PENERIMAAN  
 Keterangan: \*Data pengeluaran pemerintah diambil dari website Badan Pusat Statistik [http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=2&id\\_subyek=133](http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=2&id_subyek=133)

- Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengerasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri.
- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.
- [23] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- [24] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.
- [25] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- [26] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
- [27] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat.
- [28] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- [29] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
- [30] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- [31] Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2001 tentang Perlakuan Perpajakan di kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
- [32] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.01/1998 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Pupuk.
- [33] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.